



# *Citra* Kota Cimahi *dalam Arsip*



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA 2023





"WELCOME"  
to  
TJIMAH!

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113

#### Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- i. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

*Citra*  
**Kota Cimahi**  
*dalam Arsip*



*Arsip Nasional Republik Indonesia*



# *Citra* **Kota Cimahi** *dalam Arsip*

## **Pengarah**

Drs.Imam Gunarto, M.Hum  
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Dr. Kandar, MAP  
Deputi Bidang Konservasi Arsip

## **Penanggung Jawab Program**

Eli Ruliawati, M.AP  
Direktur Layanan dan Pemanfaatan

## **Penanggung Jawab Teknis**

R.Suryagung Sudibyo Putro, S.S, M.Hum  
Ketua Tim Pemanfaatan dan Penerbitan Naskah Sumber

## **Koordinator Kegiatan**

Desi Mulyaningsih, S.Kom

## **Narasumber**

Dr. Miftahul Falah, M.Hum

## **Editor**

R.Suryagung Sudibyo Putro, S.S, M.Hum

## **Penulis**

Dian Eka Fitriani, S.S

## **Penelusur Arsip**

Achmad Hamsari, S.ST. Ars  
Anggi Suryaningtia, A.Md  
Eviani Yusnita, S.IP  
Ghesa Ririan Mitalia, S.Hum  
Nur Mas Intan Berliana Marpaung, S. AP, MAP

## **Penerjemah**

Meyrina Megasari, M.Hum

## **Desain & Layout**

Beny Oktavianto, S.Kom

## **Penerbit**

Arsip Nasional Republik Indonesia  
Jalan Ampera Raya No.7, Jakarta Selatan 12560  
Telp. (+6221) 780 5851 Fax. (+6221) 781 0280

ISBN 978-602-6503-34-3

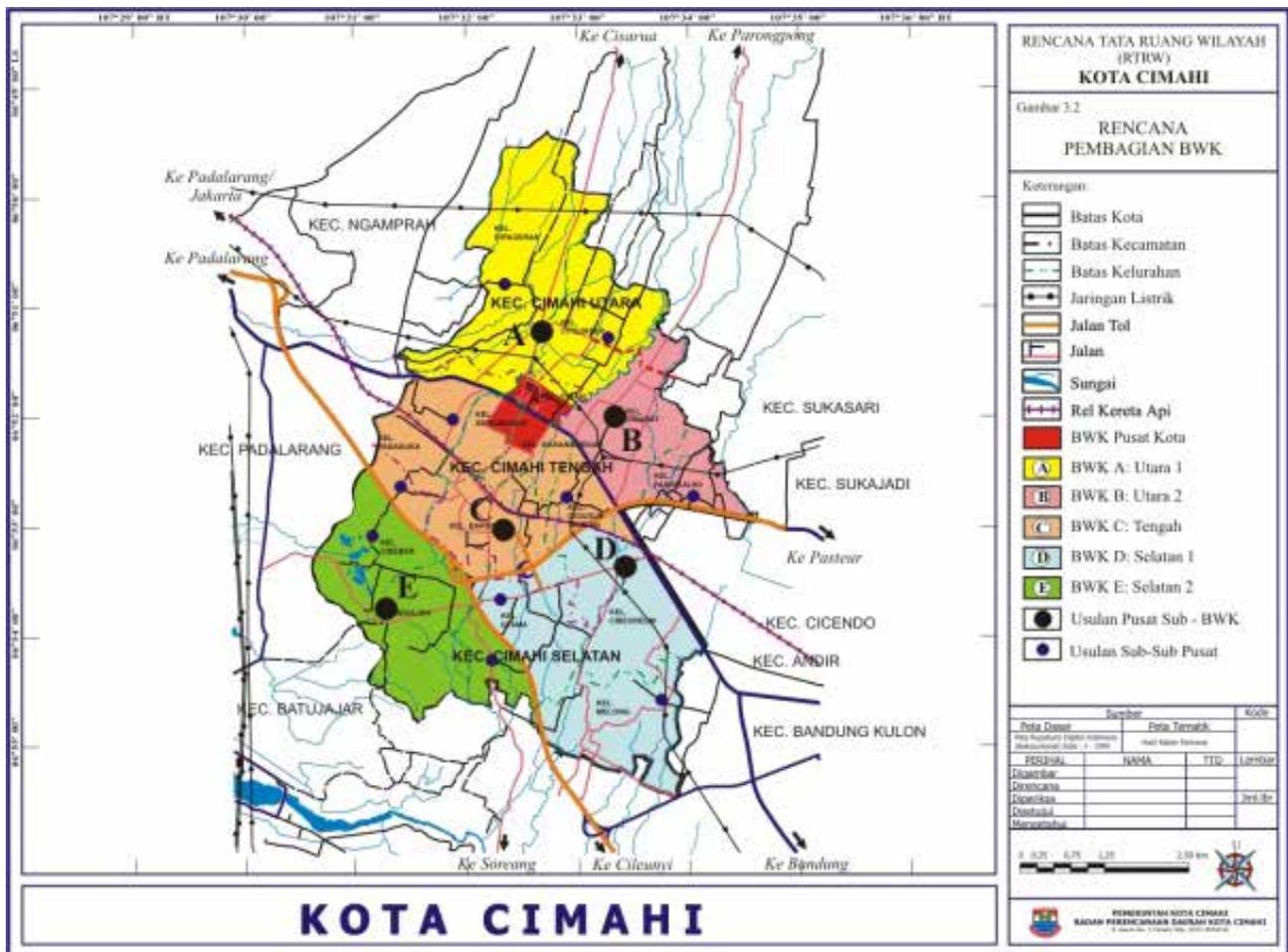


Cover : Kunjungan Presiden Sukarno  
ke Rumah Sakit Tentara di Cimahi, 1950.

Hak Cipta © 2023

Hak Publikasi pada Arsip Nasional Republik Indonesia  
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.





**PETA WILAYAH KOTA CIMAHI**

Sumber: Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi



**LAMBANG PEMERINTAH  
KOTA CIMAHI**



**DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN S.SI M.M**

Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi

Periode 2022 - Sekarang



**MARIA FITRIANA**  
Pj. Sekretaris Daerah Kota Cimahi  
Periode 3 Mei - sekarang



**IR. H. ACHMAD ZULKARNAIN, MT**

Ketua DPRD

Periode 2019 - Sekarang

## WALIKOTA CIMAHİ DARI MASA KE MASA



**Drs. H. Soedarna TM, SH MSi**  
Walikotatif Cimahi  
Periode 1976 - 1980



**R. Adeng Harmaen**  
Walikotatif Cimahi  
Periode 1980 - 1985



**Drs. H. Bunyamin Dudih, SH**  
Walikotatif Cimahi  
Periode 1985 - 1986



**Drs. Iwan Junaeni**  
Walikotatif Cimahi  
Periode 1986 - 1989



**Drs. Unang Sunarja**  
Walikotatif Cimahi  
Periode 1990- 1993



**Drs. Didin Rochadin**  
Walikotatif Cimahi  
Periode 1993 - 2001



**Drs. H. Encep Saepulloh, M.Si**  
PLH Walikotatif Cimahi  
Periode Mei 2001 - Juli 2001



**Dr. Ir. H. M. Itoc Tochija, M.M.**  
Walikota Cimahi  
Periode 2002 - 2007  
2007 - 2012



**Hj. Atty Suharti Tochija, S.E**  
Walikota Cimahi  
Periode 2012 - 2017



**Drs. H. Sudiarto, S.E., Ak.**  
PLT Walikota Cimahi  
Periode 8 Juni 2017 - 22 Oktober 2017



**Ir. H. Ajay Muhammad Priatna, M.M.**  
Walikota Cimahi  
Periode 2017 - 2020



**Letkol Inf. (Purn.) Ngatiyana, S.A.P.**  
Walikota Cimahi  
Periode 2020 - 2022



## SAMBUTAN





## SAMBUTAN WALIKOTA CIMAH I

Assalamu alaikum wr wb  
Bismillahirrahmanirrahim  
Sampurasun....

Berbagai kebijakan pembangunan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cimahi hingga memperoleh beberapa penghargaan secara nasional, salah satunya penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) tahun 2022 dari Kementerian Dalam Negeri dengan kategori sebagai Kota terinovatif. Penghargaan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai memiliki banyak inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Tentunya pada titik ini, dukungan dan partisipasi dari elemen masyarakat juga turut menjadi andil terhadap pencapaian posisi tersebut, sebagai bentuk dari penghargaan terhadap kinerja bersama yang dilaksanakan, Pemerintah Kota Cimahi berharap agar setiap rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media daerah, dapat terangkum dalam media komunikasi yang tidak akan tergerus waktu dan terangkum baik pada buku arsip, yakni Buku Citra Daerah.

Penyusunan Buku Citra Daerah Kota Cimahi penting untuk dilaksanakan sebab banyak sejarah penting yang harus disampaikan dan diketahui oleh khalayak agar semangat untuk membangun daerah terus meningkat, serta menjadi upaya untuk menghormati setiap jasa-jasa para pemimpin maupun masyarakat yang telah memberikan sumbangsih penuh demi kemajuan Kota Cimahi. Tentunya, sejarah berperan besar dalam membentuk jati diri bangsa dan arsip memiliki peran penting, ketika kehadiran arsip itu memantik ingatan kolektif yang dapat digunakan untuk membentuk identitas bersama. Dengan membaca sejarah yang ada pada Buku Citra Daerah, masyarakat sadar akan perjalanan sejarahnya dan merasa diikat oleh suatu pengalaman bersama.

Untuk itu, atas nama Pemerintah Kota Cimahi saya menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Lembaga Kearsipan Daerah Kota Cimahi, Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi, serta pihak yang terkait atas disusunnya Buku Citra Daerah Kota Cimahi. Kiranya dengan sinergitas bersama, seluruh koleksi kearsipan terkait Kota Cimahi dapat terangkum dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sehingga pada akhirnya Buku Citra Daerah menjadi media yang dapat menginformasikan kepada pembaca khususnya

generasi muda, bagaimana upaya bersama dalam membentuk citra positif daerah hingga berada pada kemajuan pembangunan dalam upaya mewujudkan ekonomi yang berkeadilan berdaya saing dan inovatif di Kota Cimahi.

Demikian yang dapat saya sampaikan, selamat membaca Buku Citra Daerah Kota Cimahi. Semoga dapat dimanfaatkan dengan baik dan memiliki nilai guna bagi kebijakan pembangunan dimasa mendatang, serta teruslah berpartisipasi dalam pembangunan dan menjadi sejarah pada setiap kemajuan yang dicapai oleh Kota Cimahi. Teriring doa dan harapan, kiranya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa mengiringi setiap langkah yang kita laksanakan.

Sekian dan Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Dikdik Suratno Nugrahawan, S.Si., M.M.**

Pj. Wali kota Cimahi



## SAMBUTAN

### KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia terdiri atas 17 ribu pulau, 1.340 suku bangsa, 742 bahasa daerah, beragam agama dan budaya. Keunikan Indonesia terletak pada keanekaragaman dan warna-warni indah tergambar secara beruntun dalam perjalanan sejarahnya yang penuh dinamika. Perjalanan sejarah Indonesia tersebut terekam dalam arsip, baik dalam arsip konvensional maupun dalam arsip media baru. Arsip merupakan memori kolektif dan jati diri bangsa, oleh karenanya arsip perlu diselamatkan, dipelihara dan dilestarikan. Arsip menjadi bagian dari pendokumentasian kekayaan seni budaya dan sebaiknya disajikan secara menarik sehingga menguatkan kecintaan dan kebanggaan generasi muda pada budaya bangsanya (Presiden Joko Widodo, Juli 2021).

Khazanah arsip mengenai Kota Cimahi banyak tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Jejak Cimahi yang dikenal sebagai kota militer tergambar disini, termasuk infrastruktur dari perumahan, sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan dan sarana prasarana lainnya.

Citra Daerah merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut berperan, memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Khazanah arsip tersebut memberikan informasi yang akurat dan obyektif mengenai perjalanan sebuah daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang terekam dalam arsip baik dalam bentuk teks, peta maupun foto mengenai sebuah daerah. Citra Daerah memberikan gambaran tentang kearifan lokal yang dimiliki sebuah daerah.

Citra Daerah merupakan satu kesatuan informasi yang menggambarkan dinamika kolektif sebuah daerah. Sebuah dinamika kolektif yang terbentuk di atas kesadaran sejarah yang dialami bersama. Citra Daerah Kota Cimahi terdiri dari 83 arsip yang berasal dari koleksi Khazanah Arsip Nasional Republik Indonesia dan Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi.

Citra Daerah Kota Cimahi ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian kehadiran Citra Daerah ini diharapkan dapat mendorong berkembangnya program lanjutan dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi khususnya di bidang kearsipan

Jakarta, 19 Juni 2023

Kepala,



**Drs.Imam Gunarto, M.Hum**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	iii
Peta Wilayah Kota Cimahi .....	v
Lambang Pemerintah Kota Cimahi .....	vi
Pj. Walikota Cimahi .....	vii
Plt. Sekretaris Daerah Kota Cimahi .....	viii
Ketua DPRD Kota Cimahi .....	ix
Walikota Cimahi dari masa ke masa .....	x
Sambutan Walikota Cimahi .....	xii
Sambutan Kepala Arsip Nasional RI .....	xiv
Daftar Isi .....	xvi
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Dari Cilokotot ke Cimahi .....	3
B. Cimahi Sebagai Kota Militer .....	4
C. Dari Kota Administratif Cimahi ke Kota Cimahi .....	6
<b>CITRA KOTA CIMAHİ DALAM ARSIP .....</b>	<b>9</b>
A. Geografis .....	10
B. Politik dan Pemerintahan .....	18
C. Keagamaan .....	38
D. Pendidikan .....	44
E. Perekonomian .....	96
F. Kemiliteran .....	72
G. Infrastruktur .....	94
Daftar Pustaka .....	107
Penutup .....	108





---

## PENDAHULUAN

---



## PENDAHULUAN

Kota Cimahi merupakan salah satu kota otonom di Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya, Kota Cimahi merupakan bagian dari Kabupaten Bandung, dengan status sebagai kota administratif. Status kota administratif dihapus dalam struktur pemerintahan daerah sejak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 diberlakukan. Pemerintah memberikan dua pilihan, menjadi kota otonom atau kembali menjadi kecamatan di kabupaten induknya. Berkaitan dengan itu, Kota Administratif Cimahi menghadapi dilema. Pada awalnya, Pemerintah Kabupaten Bandung menginginkan Kota Administratif Cimahi kembali menjadi kecamatan, sedangkan mayoritas penduduk Kota Administratif Cimahi menginginkan Cimahi menjadi kota otonom. Dalam prosesnya, terjadi tarik menarik kepentingan politik hingga akhirnya status Cimahi ditingkatkan menjadi kota otonom. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 21 Juni 2001. Sejak saat itu, lahirnya kota otonom baru di wilayah Provinsi Jawa Barat bernama Kota Cimahi. Tanggal pengesahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi, kemudian ditetapkan oleh Pemerintah Kota Cimahi sebagai sebagai Hari Jadi Kota Cimahi. Berdasarkan undang-undang tersebut, wilayah Kota Cimahi dibagi ke dalam tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Tengah, dan Cimahi Selatan.

Secara geografis, Kota Cimahi terletak di antara 1070 30'30" – 1070 34'30" Bujur Timur dan 60 50'00" – 60 56'00" Lintang Selatan. Wilayah Kota Cimahi merupakan lembah cekungan yang melandai ke arah selatan. Di bagian utara, ketinggian wilayah mencapai + 1.040 meter di atas permukaan laut, sementara di bagian selatannya berkisar + 685 meter di atas permukaan laut. Bagian utara Kota Cimahi lebih tinggi karena merupakan bagian dari lereng Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu. Di sisi lain, bagian selatannya melandai ke arah lembah Sungai Citarum.

Kota Cimahi terkenal kota militer. Hal ini berkaitan dengan sejarah perkembangan kota ini sebagai sebuah pusat garnisun militer Hindia Belanda. Meskipun demikian, perkembangan Kota Cimahi juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan wilayah-wilayah di sekitarnya, terutama Kabupaten Bandung, sebab sejak masa kolonial hingga masa kini, wilayah Cimahi merupakan bagian dari Kabupaten Bandung. Mustahil untuk membahas perkembangan wilayah Cimahi tanpa melihat sejarah Kabupaten Bandung.

Sekelumit gambaran perkembangan wilayah Cimahi sebagai bagian dari Kabupaten Bandung pada masa kolonial Belanda telah dituliskan dalam buku *Cimahi Dalam Arsip Jaman Pra Kemerdekaan 1870-1942* yang terlebih dulu diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2012. Buku tersebut mengupas sejarah wilayah Cimahi berdasarkan periodisasi pemerintahan para wedana yang pernah berkuasa di Cimahi mulai dari tahun 1870 hingga 1942. Sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan

buku tersebut didapat dari arsip-arsip surat keputusan mengenai pengangkatan para wedana.

Disisi lain, *Citra Kota Cimahi dalam Arsip* menghadirkan kilasan sejarah perkembangan Cimahi yang terekam dalam arsip-arsip koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia. Penerbitan *Citra Kota Cimahi dalam Arsip* dimaksudkan untuk melengkapi buku *Cimahi Dalam Arsip Jaman Pra Kemerdekaan 1870-1942*. Oleh sebab itu, arsip-arsip yang telah ditampilkan dalam buku *Cimahi Dalam Arsip Jaman Pra Kemerdekaan 1870-1942* tidak akan dihadirkan kembali pada *Citra Kota Cimahi dalam Arsip*.

#### **A. Dari Cilokotot ke Cimahi**

Toponimi Cimahi yang paling tua tercatat dalam Babad Batulayang. Disebutkan bahwa pada abad ke-16, Tanah Ukur (Daerah Ukur) terdiri atas sembilan *umbul*: Batulayang, Saung Watang, Taraju, Kahuripan, Medang Sasigar, Malangbong, Mananggal, Sagala Herang, dan Manabaya. Setiap *umbul* meliputi beberapa kesatuan wilayah yang lebih kecil. *Umbul* Kahuripan terdiri atas Cimahi dan Cikalong. Sumber selanjutnya yang menyebutkan toponimi Cimahi adalah catatan perjalanan Abraham van Riebeeck, pegawai VOC, yang melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Priangan antara tahun 1703 dan 1709. Dalam catatan bertanggal 19 September 1709, Riebeeck menulis tentang sebuah tempat yang dilewati sungai berarus deras, Tsji Makij. Menurut Kepala Landsarchief Batavia, F. de Haan, Tsji Makij merujuk kepada toponimi Cimahi. Menurut sejarawan Nina Herlina Lubis, catatan perjalanan Riebeeck kemungkinan besar adalah sumber kolonial tertua yang menyebut nama Cimahi.

Wilayah Cimahi kembali tercatat dalam sumber tertulis pada masa pemerintahan Daendels (1808-1811). Pembangunan Jalan Raya Pos (*Grote Postweg*) yang diprakarsai oleh Daendels ikut melewati wilayah Cimahi, yang saat itu merupakan bagian dari *kecutakan* (kawedanan) Cilokotot. Pada saat itu, Cilokotot merupakan salah satu dari 12 *kecutakan* yang berada di bawah Kabupaten Bandung. Sebelas *kecutakan* lainnya adalah Rongga, Kopo, Rajamandala, Cihea, Gandasoli, Cinusa, Ujungberung Kulon, Ujungberung Wetan, Timbanganten, Suci (Garut), dan Panembong (Bayongbong). Untuk melengkapi prasarana transportasi melewati Jalan Raya Pos, pemerintah kolonial membangun pos penjagaan di wilayah yang sekarang menjadi alun-alun Kota Cimahi (Lubis, 2015: 18-20). Ketika pimpinan pemerintahan beralih dari Daendels (Belanda) ke Raffles (Inggris), wilayah administrasi di Jawa juga ikut berubah. Kabupaten Bandung yang sebelumnya dibagi ke dalam 12 *kecutakan*, pada masa Raffles diubah menjadi 17 kawedanan, yaitu Timbanganten, Cikembulan, Baluburlimbangan, Cicalengka, Cilokotot, Majalaya, Cipeujeuh, Ujungberung Kulon, Ujungberung Wetan, Banjaran, Rongga, Rajamandala, Cihea, Gandasoli, Cinusa, Cisondari, dan Kopo (Pemerintah Kota Cimahi, 2012: 14).

Sebagai bagian dari Kabupaten Bandung, perkembangan wilayah Cimahi sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan administrasi yang terjadi di kabupaten tersebut. Dikutip dari *Cimahi Dalam Arsip Jaman Pra Kemerdekaan 1870-1942*, Kabupaten

Bandung mengalami berkali-kali perubahan administrasi pada tahun 1812, 1845, 1871, 1882, 1901, 1913, 1926, 1929, dan 1931. Sampai tahun 1901, Cimahi masih menjadi salah satu dari empat onderdistrik di Distrik Cilokotot. Onderdistrik Cimahi diperintah oleh seorang wedana yang dibantu oleh seorang asisten wedana, sementara onderdistrik lainnya dipimpin oleh asisten wedana. Hal tersebut disebabkan oleh posisi Cimahi sebagai ibukota Distrik Cilokotot. Pada masa tersebut, Cimahi sudah dijadikan pusat garnisun militer oleh pemerintah Hindia Belanda. Momentum perubahan administrasi yang cukup penting adalah perubahan nama Distrik Cilokotot menjadi Distrik Cimahi pada tanggal 1 Juli 1913. Melalui Surat Keputusan (*Besluit*) Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 7 Mei 1913 No. 60 mengenai perubahan administrasi di wilayah Karesidenan Priangan, Cimahi menjadi sebuah distrik yang terbagi ke dalam empat onderdistrik, yaitu Cimahi, Cisarua, Padalarang, dan Batujajar, dan 47 desa. Dengan demikian, cakupan wilayah Cimahi pun bertambah luas (Pemerintah Kota Cimahi, 2012: 15).

Berikut adalah daftar nama wedana yang pernah memerintah Distrik Cilokotot hingga berganti nama menjadi Distrik Cimahi.

No.	Nama	Mulai Memerintah Tahun
<b>Wedana Cilokotot</b>		
1.	Raden Rangga Suma Di Reja	1878
2.	Raden Padma Kusumah	1887
3.	Raden Jayakusumah	1895
4.	Raden Surianingrat	1896
5.	Raden Kanduruan Suma Winata	1906
6.	Raden Kanduruan Wirabrata	1911
<b>Wedana Cimahi</b>		
7.	Raden Kanduruan Wirabrata	1913
8.	Raden Wiradanu Atmaja	1922
9.	Raden Suryadiningrat	1923
10.	Raden Rangga Harjakusuma	1923
11.	Raden Rangga Martaatmaja	1931
12.	Raden Rangga Wiraharja	1941

## B. Cimahi Sebagai Kota Militer

Kekalahan dari Inggris dan kondisi Batavia yang kurang higienis merupakan alasan pemerintah kolonial Belanda mencari wilayah baru untuk dijadikan markas militer. Posisi Batavia di wilayah pesisir dianggap tidak menguntungkan secara militer. Selain itu, Batavia memiliki suhu dan cuaca yang cukup panas dengan lingkungan yang kurang bersih dan kurang terjaga sanitasinya sehingga menyebabkan timbulnya banyak penyakit. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemerintah kolonial mengarahkan pencarian ke daerah pedalaman di dataran tinggi yang memiliki iklim dan lingkungan

yang lebih baik tetapi tidak terlalu jauh dari Batavia. Cimahi, yang terletak di jalur Jalan Raya Pos (*Grote Postweg*) Batavia-Garut, menjadi pilihan karena memenuhi syarat tersebut (Momongan, 2021: 10).

Pengembangan Cimahi sebagai sebuah pusat garnisun militer dimulai dari pembangunan pusat pendidikan militer pada 1886 (Pemerintah Kota Cimahi, 2012: 15) dan rumah sakit militer pada tahun 1887 (Lubis, 2015: 43). Tidak hanya itu, pada tahun 1896 Cimahi juga dilengkapi dengan pabrik mesiu dan penjara militer yang dipindahkan dari Ngawi, Jawa Timur, serta pabrik senjata *Artillerie Constructie Winkel* (ACW) yang dipindahkan dari Surabaya ke Bandung. Pemerintah Hindia Belanda kemudian meresmikan Cimahi sebagai pusat militer pada bulan September 1896. Fungsinya adalah sebagai pusat komando pengendalian pasukan dan koordinasi/mobilisasi/pengerahan pasukan untuk digunakan dalam operasi-operasi tempur serta fungsi-fungsi kemiliteran lainnya (Lubis, 2015: 45).

Setelah diresmikan sebagai pusat garnisun militer Hindia Belanda, pembangunan infrastruktur di Cimahi tidak berhenti. Pemerintah Hindia Belanda melengkapi fungsi pusat garnisun militer di Cimahi dengan membangun lapangan terbang di Andir pada tahun 1914. Selain itu, sekolah-sekolah untuk berbagai kalangan juga mulai didirikan. Sarana dan prasarana lain untuk mendukung Cimahi sebagai pusat militer juga terus dikembangkan. Pembangunan-pembangunan ini sejalan dengan rencana untuk memindahkan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung (Lubis, 2015: 46). Sayangnya, gagasan tersebut tidak pernah terlaksana meskipun Cimahi telah menjadi pusat garnisun militer utama di Hindia Belanda.

Fungsi Cimahi sebagai pusat militer terus berlanjut ketika pemerintah kolonial berganti dari Belanda ke Jepang. Fasilitas-fasilitas militer yang terdapat di Cimahi dimanfaatkan oleh Jepang dengan beberapa penyesuaian, misalnya penyediaan kamp interniran bagi orang Belanda dan Eropa lainnya. Jepang juga menggunakan pendidikan militer yang terdapat di Cimahi untuk para calon tentara Pembela Tanah Air (PETA) (Lubis, 2015: 59).

Sampai masa setelah kemerdekaan, Cimahi juga tetap digunakan sebagai salah satu pusat kemiliteran sebab telah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung. Cimahi kini merupakan markas dari Brigade Infanteri (Brigif) 15/Kujang II yang berada di bawah Komando Daerah Militer III/Siliwangi. Wilayah Kota Cimahi yang lebih kecil daripada Distrik Cimahi pada masa kolonial menjadi penyebab beberapa fasilitas militer tidak bisa lagi disebut berada di wilayah Cimahi masa kini. Beberapa fasilitas yang masih berada dalam wilayah administratif Kota Cimahi, antara lain Pusat Kesenjataan Artileri (Pusen Art), Pusat Pendidikan Artileri, Sekolah Pelatih Infanteri, Pusat Pendidikan Infanteri (SPI Pusdikif), Pusat Pendidikan Peralatan (Pusdikpal), dan sebagainya (Lubis, 2015: 76).

### C. Dari Kota Administratif Cimahi ke Kota Cimahi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat, wilayah Karesidenan Priangan menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat yang beribu kota di Bandung. Hal ini menjadikan Cimahi, salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung, sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 1975, Kecamatan Cimahi serta sebagian wilayah Kecamatan Batujajar, dianggap telah berkembang pesat serta menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan. Dengan demikian, pemerintah membentuk Kota Administratif Cimahi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Cimahi. Pemerintah Kota Administratif Cimahi bertanggung jawab kepada pemerintah Kabupaten Bandung. Dengan kata lain, Kota Cimahi saat itu masih menjadi bagian dari Kabupaten Bandung.

Kota Administratif Cimahi mencakup wilayah Kecamatan Cimahi dan sebagian Kecamatan Batujajar sebagaimana dimaksud dalam daftar lampiran Staatsblad Tahun 1935 Nomor 123. Wilayahnya meliputi

a. wilayah Kecamatan Cimahi, yang terdiri atas:

1. Desa Melong
2. Desa Cibeureum
3. Desa Pasirkaliki
4. Desa Cigugur
5. Desa Baros
6. Desa Cibabat
7. Desa Cimahi Timur
8. Desa Cimahi Utara
9. Desa Cimahi Barat
10. Desa Padasuka
11. Desa Citeureup
12. Desa Cipageran

b. wilayah Kecamatan Batujajar, yang terdiri atas:

1. Desa Utama
2. Desa Leuwigajah
3. Desa Cibeber

Dari pembentukan Kota Administratif Cimahi, terdapat beberapa perubahan administrasi yang berpengaruh terhadap cakupan wilayah di sekitar Cimahi. Misalnya, Desa Cilame dan Desa Tanimulya, yang sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Cimahi, ditambahkan ke dalam wilayah Kecamatan Padalarang. Selain itu, desa-desa di Kecamatan Batujajar, yang tercantum sebagai bagian dari Kota Administratif Cimahi, tidak lagi menjadi wilayah Kecamatan Batujajar.

Sementara itu, Kota Administratif Cimahi dibagi ke dalam tiga kecamatan, yaitu

a. Kecamatan Cimahi Utara yang berkedudukan di Cibabat, terdiri atas:

1. Desa Cipageran
2. Desa Citeureup
3. Desa Cibabat
4. Desa Pasirkaliki

b. Kecamatan Cimahi Tengah yang berkedudukan di Cimahi, terdiri atas:

1. Desa Padasuka
2. Desa Cimahi Barat
3. Desa Cimahi Timur
4. Desa Cimahi Utara
5. Desa Baros
6. Desa Cigugur

c. Kecamatan Cimahi Selatan yang berkedudukan di Leuwigajah, terdiri atas:

1. Desa Melong
2. Desa Cibeureum
3. Desa Utama
4. Desa Leuwigajah
5. Desa Cibeber

Kota Administratif Cimahi bertahan hingga masa Reformasi. Pasca diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah banyak membentuk wilayah-wilayah baru yang bersifat otonom. Kota Cimahi termasuk wilayah yang dikembangkan sebagai sebuah kota otonom yang pemerintahannya terlepas dari Kabupaten Bandung. Pada 21 Juni 2001, Presiden Abdurrahman Wahid mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi. Perkembangan dan kemajuan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung serta aspirasi dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri merupakan salah satu faktor yang mendorong pembentukan Kota Cimahi sebagai sebuah daerah otonom.

Wilayah Kota Cimahi mencakup wilayah Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Tengah, dan Cimahi Selatan. Batas-batas Kota Cimahi adalah

- sebelah utara dengan Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Ngamprah di Kabupaten Bandung;
- sebelah timur dengan Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, dan Kecamatan Andir di Kota Bandung;
- sebelah selatan dengan Kecamatan Margaasih dan Kecamatan Bandung Kulon di Kota Bandung; serta
- sebelah barat dengan Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Batujajar di Kabupaten Bandung.

Kota Cimahi dipimpin oleh seorang wali kota yang didampingi oleh seorang wakil wali kota. Penjabat wali kota diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, pemerintah Kota Cimahi bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Dalam Negeri. Sebagai sebuah daerah otonom, Kota Cimahi memiliki kewenangan untuk mengatur seluruh aspek di bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib yang meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Namun, ada pula bidang-bidang yang bukan merupakan kewenangan daerah otonom, yaitu bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta bidang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



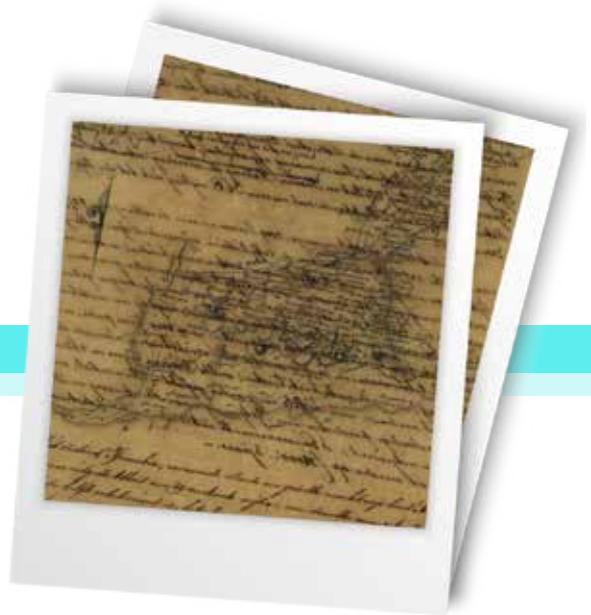
---

**CITRA KOTA CIMAHI  
DALAM ARSIP**

---



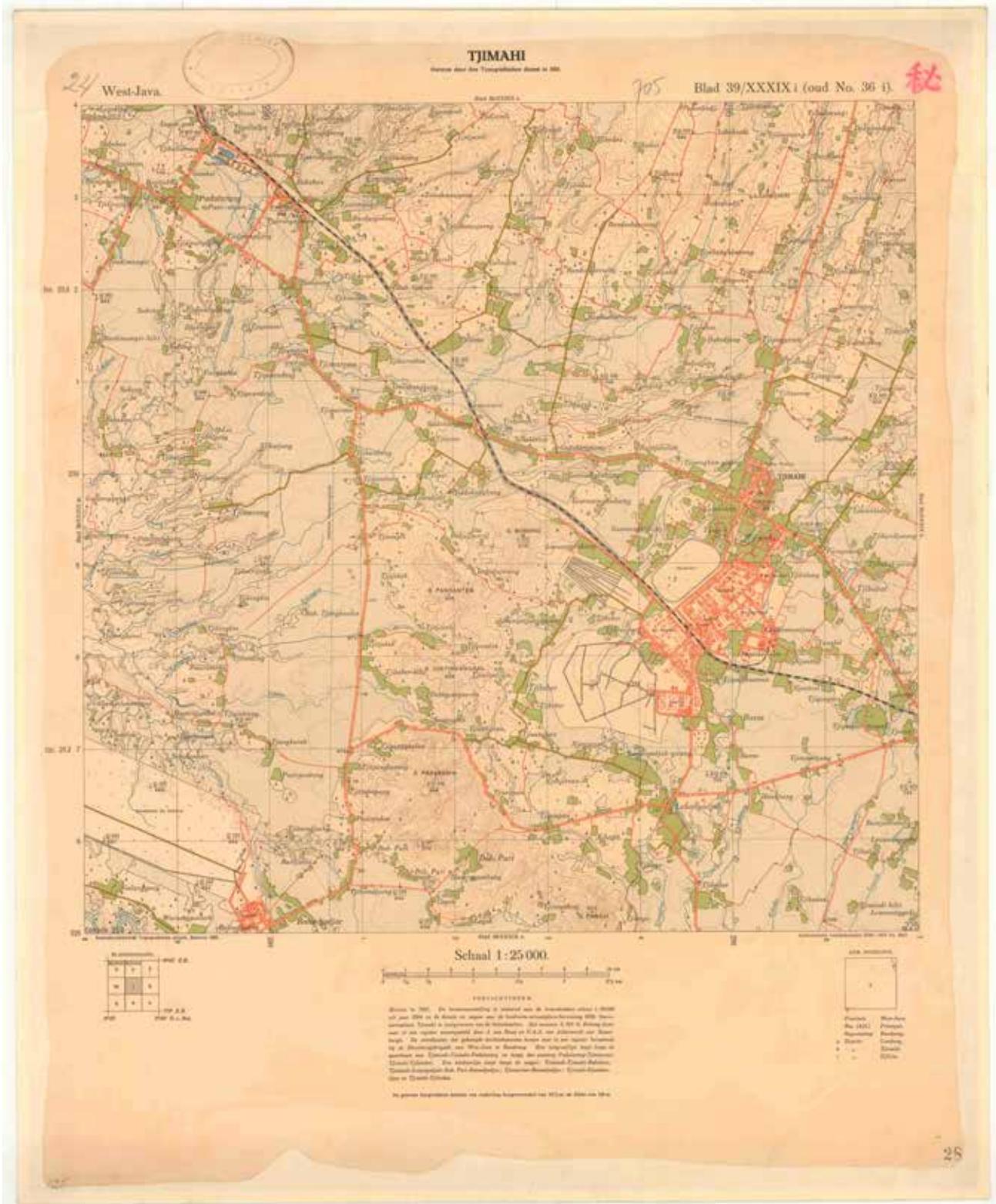
# *Geografis*



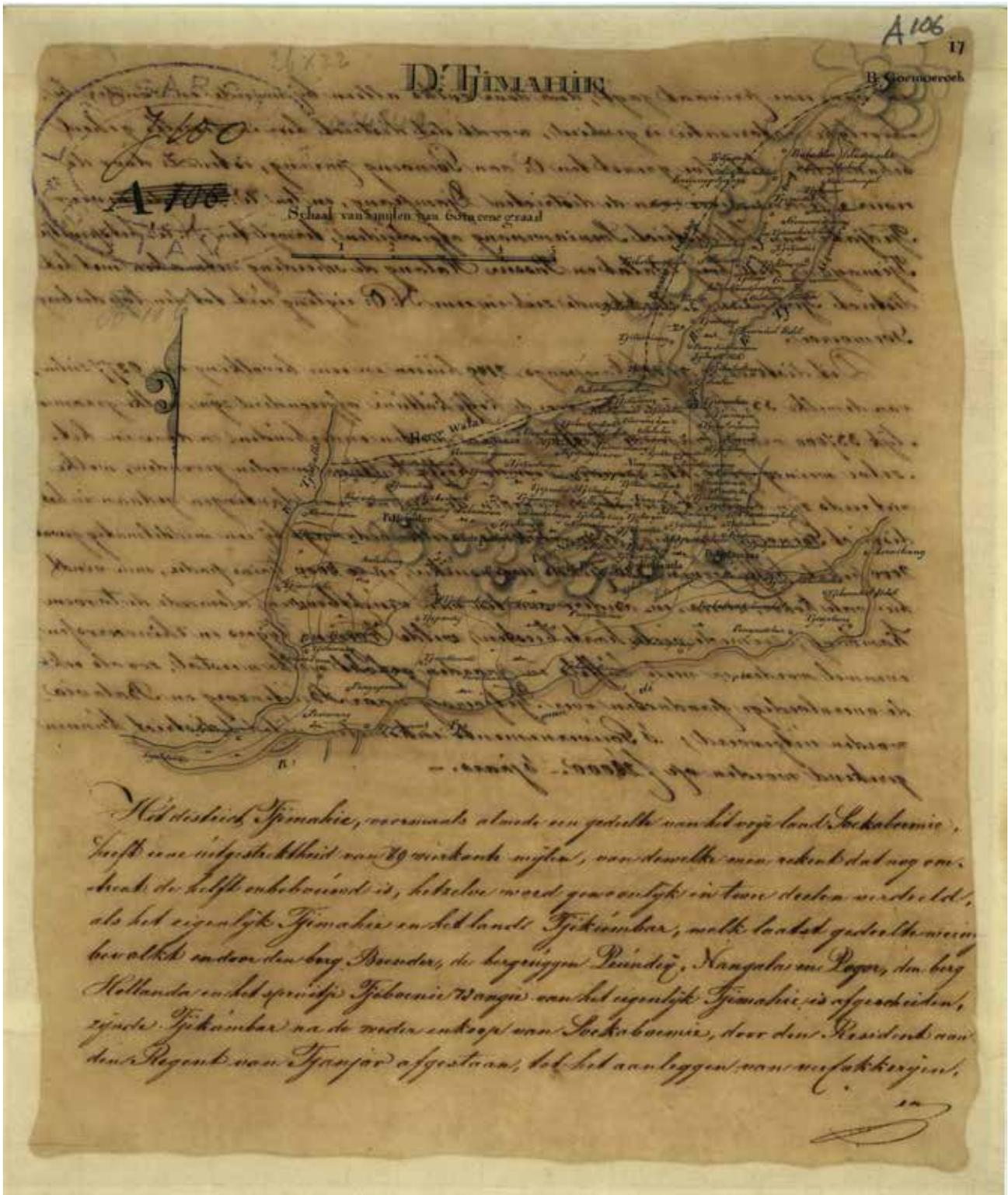
Pada Bab Geografis terdapat arsip yang menggambarkan keadaan geografis wilayah Kota Cimahi, yang terdiri dari Peta Cimahi, Pemandangan Sungai Cibabat dan Sungai Citarum, dan Air Terjun di Cimahi. Kota Cimahi secara geografis terletak di antara 1070 30'30" – 1070 34'30" Bujur Timur dan 60 50'00" – 60 56'00" Lintang Selatan. Dikutip dari *Kota Cimahi Dalam Angka 2020*, wilayah Kota Cimahi merupakan lembah cekungan yang melandai ke arah selatan, dengan ketinggian di bagian utara + 1.040 meter di atas permukaan laut dan ketinggian di bagian selatan + 685 meter di atas permukaan laut. Bagian utara Kota Cimahi merupakan lereng Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu, sementara bagian selatannya melandai ke Sungai Citarum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> BPS Kota Cimahi, *Kota Cimahi Dalam Angka 2020*, hlm. 3-4



Peta wilayah Cimahi, 1933.  
 Pada tahun 1935, Cimahi ditetapkan sebagai kecamatan berdasarkan lampiran Staadblad No. 123 tahun 1935.  
 Pada tahun 1962, dibentuk Kawedanaan Cimahi yang meliputi Kecamatan Cimahi, Padalarang, Batujajar, dan Cipatat.  
 Sumber: ANRI, Kartografi Indonesia No. 705



Peta Distrik Cimahi yang merupakan bagian dari Residensi Preanger, tanpa tahun.

Sumber: ANRI, Kartografi De Haan Nomor A.106

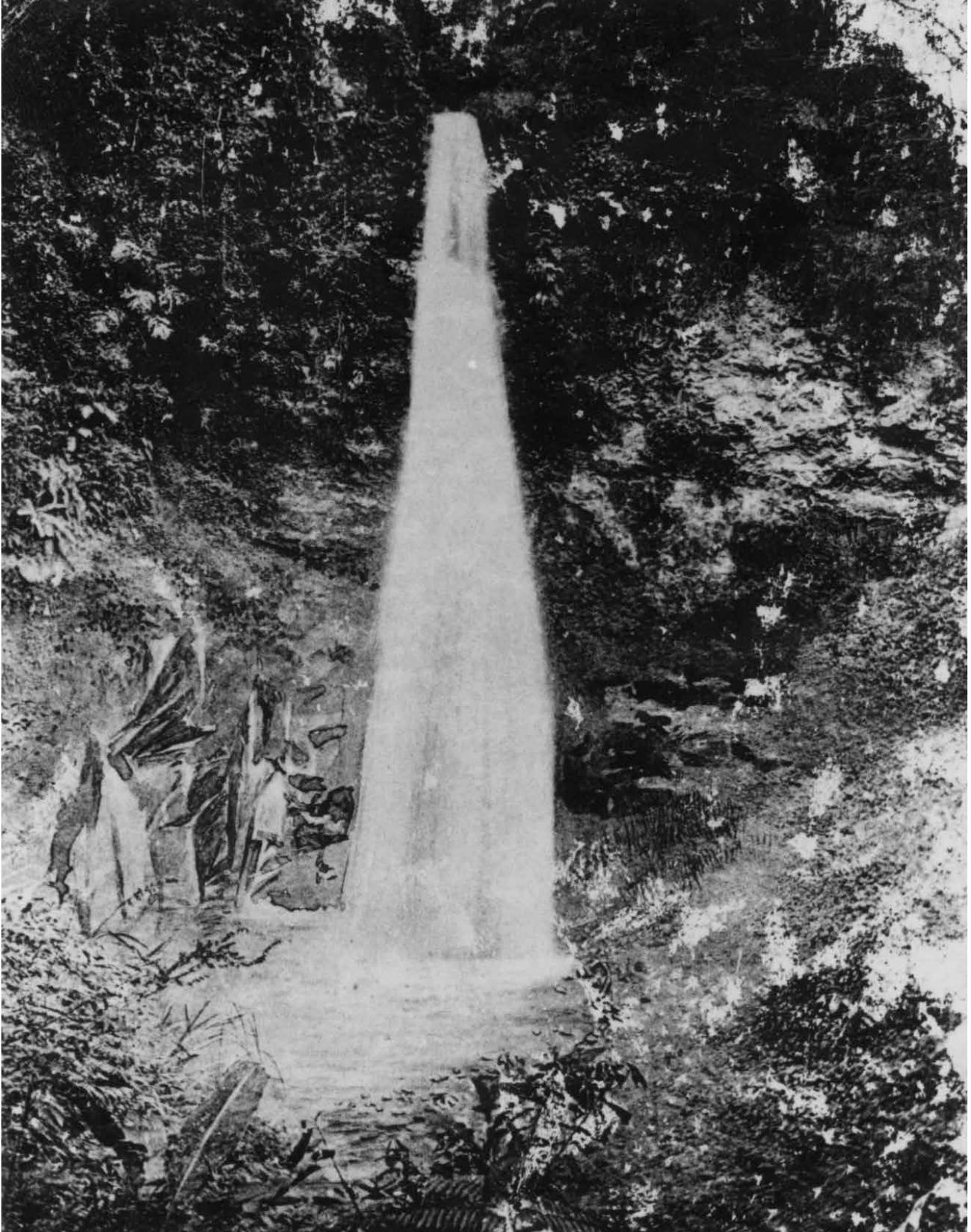


Pemandangan Sungai Cibabat di Cimahi, [1930].

Sungai Cibabat termasuk sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Citarum yang berada di Kota Cimahi. Sungai ini berhulu di Kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

*Sumber: ANRI, KIT Jawa Barat No. 959/77*





Air terjun di Cimahi, [1930].

Air terjun Cimahi atau Curug Cimahi memiliki ketinggian sekitar 87 meter. Merupakan salah satu curug yang tertinggi di wilayah Bandung dan sekitarnya. Nama Cimahi di curug ini berasal dari nama sungai Cimahi, yang berhulu di Situ Lembang.

*Sumber: ANRI, KIT Jawa Barat No. 32/66*



Air terjun dari aliran Sungai Citarum di Cimahi, [1930].  
Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat. Sungai itu menjadi sumber air minum untuk masyarakat di Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Bandung serta Cimahi.

*Sumber: ANRI, KIT Jawa Barat No. 959/79*

# *Politik dan Pemerintahan*



Pada Bab Politik dan Pemerintahan terdiri dari 15 arsip, antara lain surat Gubernur Jenderal tentang permohonan mantan wedana distrik Cimahi, kunjungan Presiden Sukarno dan pejabat lainnya ke Cimahi serta UU No 29 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi.

Dari arsip tersebut terlihat bagaimana Cimahi sudah ada sejak masa kolonial, waktu masih bernama Distrik Cimahi Residentie Preanger. Begitupun dengan status Cimahi yang sebelumnya kecamatan berubah menjadi kota administratif hingga menjadi Kota seperti sekarang ini.

Ontvangen bij de Afdeling 11/8  
den Redacteur 14/8  
Afgedaan door idem 14/8  
Geresumeerd door

Ontvangen bij den Gouv. Secretaris  
Afgedaan door hem

Ag. 20978/10  
11656 ps  
(Afd. III)

# BESLUIT.

N<sup>o</sup> 42 den 25 Augustus 1910.

GEARRESTEERD.

27 VIII 11

met de heer...

om het daaraan te luider dat hij

1608  
1624

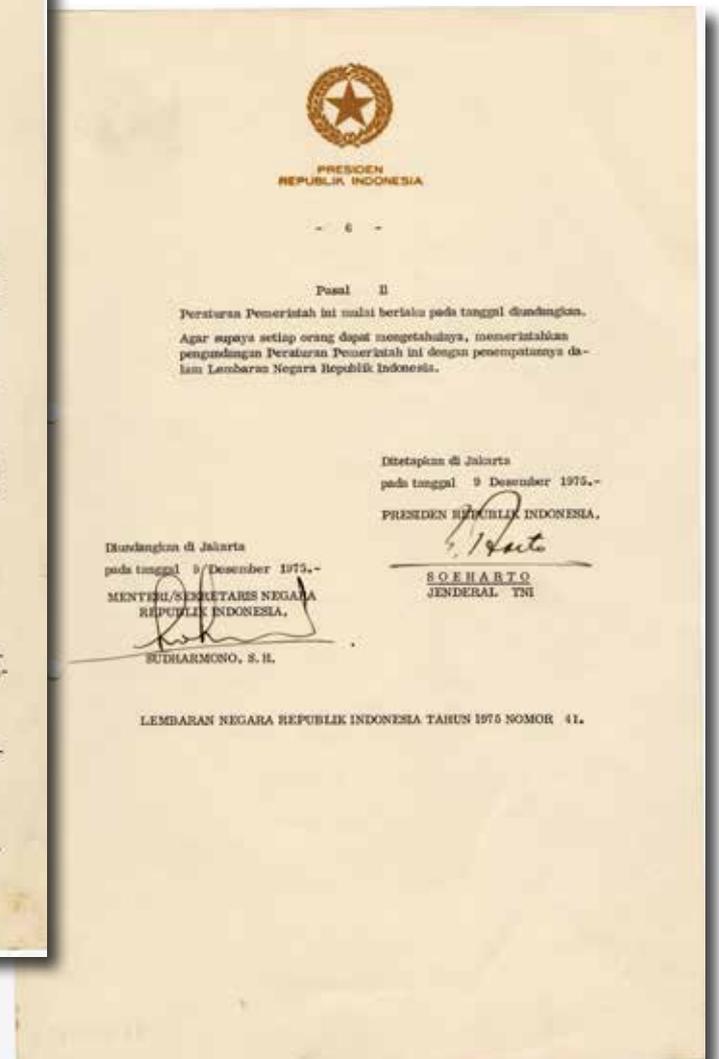
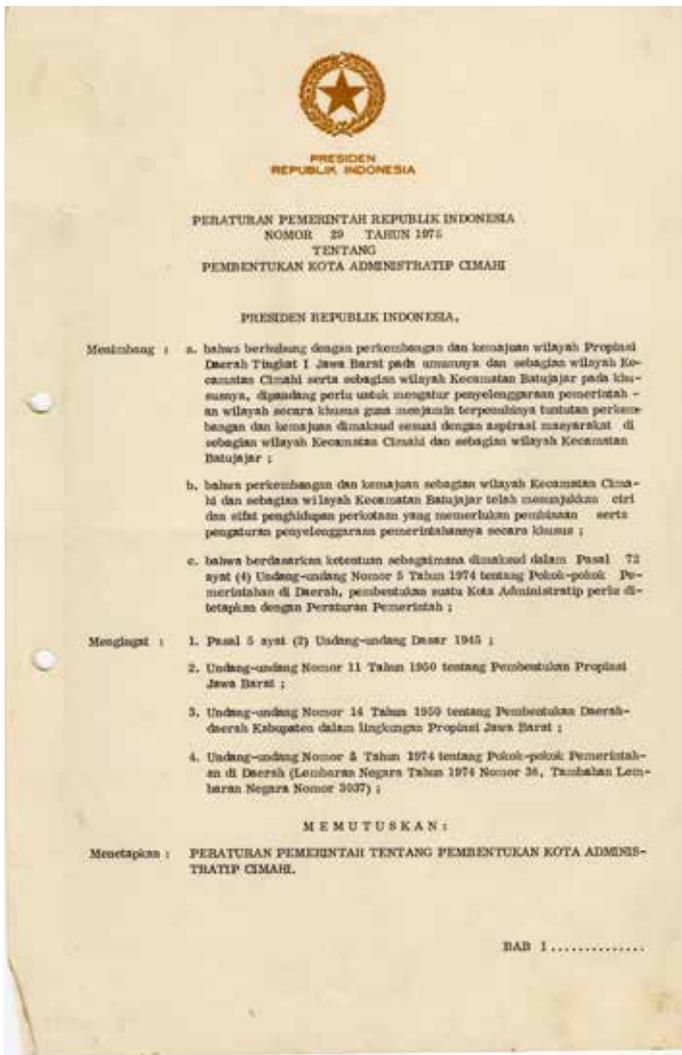
Verlezen het verzoek van 30 Maart 1910  
no 16 verhandeld request, ge-  
kasteekend Soekaboemi t. v. van Mas Natadimangala  
gouverneur medana van het dis-  
trict Jimahi Preanger-Regent-  
schappen, houdende verzoek  
een beschikking <sup>met</sup> ontzagen  
op zijn tot de <sup>gubede</sup> Kamas de Sta-  
ten-Generaal gericht adressen  
van 10 April 1908 en 10 Maart  
1909, <sup>waartoe hij verzoekt heeft</sup>  
het van queren en <sup>toekoming</sup>  
van ordent and in overeenstemming  
met den vroeger door hem beklaan  
rang;

Gelesen de missive van  
den Minister van Koloniën  
van 2 juli 1910, Afdeling  
A, <sup>B</sup> <sup>13</sup> <sup>1147</sup>

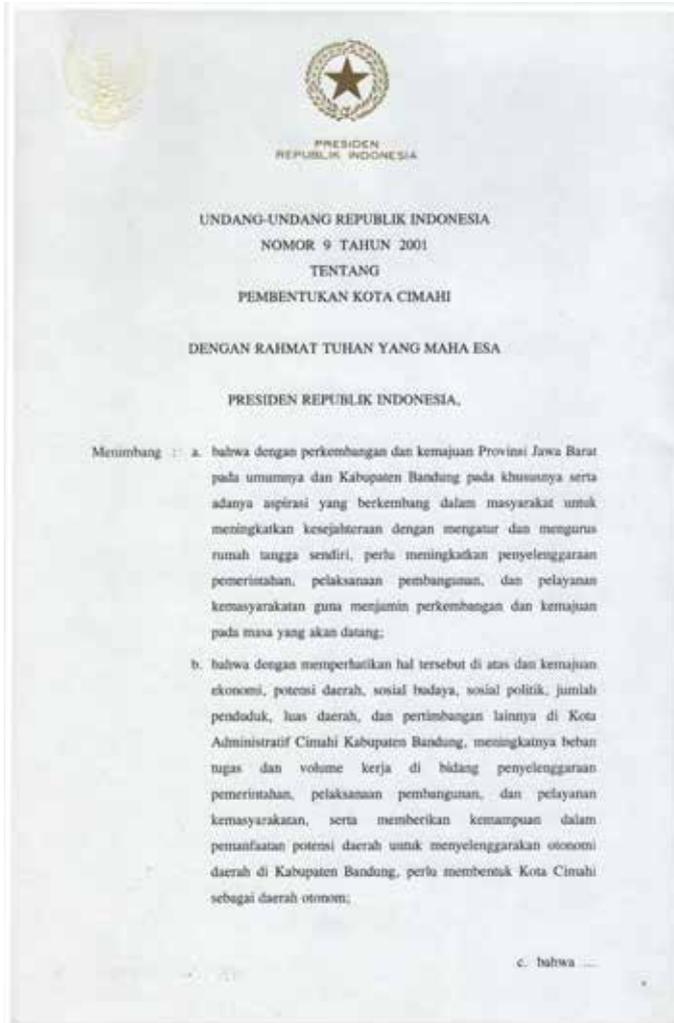
REG.  
EXP.  
MIN.  
IND.  
NOT.  
O. R.

1620 K<sup>2</sup>  
1624 A<sup>2</sup>

Surat Gubernur Jendral tanggal 25 Agustus 1910 No 42 mengenai pengabulan permohonan mantan Wedana di Distrik Cimahi, Afdeling Soekaboemi/ Residentie Preanger Regentschappen, Mas Nata di Mengala atas pemberhentian dengan hormatnya. (Berkas penyelidikan masa jabatan Mas Nata di Mengala terlampir)  
Sumber : ANRI, GB BT No. 1717



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1975  
tentang Pembentukan Kota Administratif Cimahi  
Sumber: ANRI, Sekretariat Negara RI Seri Produk Hukum 1949-2005 No. 2694 A



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi.

Undang-undang tersebut disahkan untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Cimahi. Hal itu disebabkan oleh perkembangan serta kemajuan, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya di Kota Administratif Cimahi yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Bandung.

Sumber: ANRI, *Setneg RI Seri Produk Hukum 1949-2005 No. 921 A*



Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Cimahi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul, Kejaksaan Negeri Ampana, dan Kejaksaan Negeri Meureudu  
Sumber: ANRI, Sekertariat Kabinet RI Seri Produk Hukum 2000-2010 No. 1278 A



Kunjungan Presiden Sukarno ke Sekolah Kader di Cimahi, 1950.  
*Sumber: ANRI, Kempen RI Wilayah Jawa Barat 1950 No. JB5002/1052, 1059*





Kunjungan Presiden Sukarno ke Rumah Sakit Tentara di Cimahi, 1950.  
*Sumber: ANRI, Kempen RI Wilayah Jawa Barat 1950 No. JB5002/1127*



Kunjungan Presiden Sukarno ke Rumah Sakit Tentara di Cimahi, 1950.  
Tampak pada foto Jenderal Mayor Suhardjo dan Direktur Kabinet Presiden,  
Mr. A.K. Pringgodigdo, dengan pegawai rumah sakit.

*Sumber: ANRI, Kempen RI Wilayah Jawa Barat 1950 No. JB5002/1072*



Kunjungan Presiden Sukarno ke Rumah Sakit Tentara di Cimahi, 1950.  
Presiden Sukarno mengunjungi Bagian Penyakit TBC di rumah sakit.  
*Sumber: ANRI, Kempen RI Wilayah Jawa Barat 1950 No. JB5002/1128*





Kunjungan Presiden Sukarno ke Rumah Sakit Tentara di Cimahi, 1950.  
Tampak pada foto Presiden Sukarno dan pegawai rumah sakit.  
*Sumber: ANRI, Kempen RI Wilayah Jawa Barat 1950 No. JB5002/1130*



Kunjungan Presiden Sukarno ke Rumah Sakit Tentara di Cimahi, 1950.  
Tampak pada foto Presiden Sukarno dan pegawai rumah sakit.  
*Sumber: ANRI, Kempen RI Wilayah Jawa Barat 1950 No. JB5002/1131*



Lukisan KH. Usman Dhomiri, tanpa tahun.

*Sumber : Perorangan/Masyarakat*

KH. Usman Dhomiri lahir pada 1870 di Kampung Arab, Indramayu, Jawa Barat sebagai anak pertama keturunan Arab yang dikenal dengan panggilan Mbah Rubayya. K. H. Usman Dhomiri merupakan murid Syaikh Ali Thoyyib sebagai penerus perjuangan Syaikh Ahmad Tijani. Pada 1930, K. H. Usman Dhomiri pindah ke Cimahi dan menyebarkan Islam, khususnya Tarekat Tijani.

Pada masa Perang Kemerdekaan, K. H. Usman Dhomiri membentuk laskar Perjuangan Fisabilillah. Perjuangan K. H. Usman Dhomiri bersama Fisabilillah diawali dengan membebaskan warga Buniasari dari ancaman kelompok garong pimpinan Durahman. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, pasukan Fisabilillah berhasil merampas beberapa pucuk senjata milik Jepang dan menjadi modal awal dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Cimahi. Dalam perkembangan selanjutnya, Fisabilillah menjadi salah satu laskar perjuangan yang diperhitungkan kekuatannya oleh Belanda sehingga acapkali menjadi sasaran serangan militer Belanda. Dari penuturan beberapa orang saksi, dalam kurun waktu Januari-Februari 1946, setidaknya-tidaknnya, Belanda melancarkan serangan ke markas Fisabilillah sebanyak tiga kali.

Setelah Perang Kemerdekaan selesai, K. H. Usman Dhomiri mengundurkan diri dari Laskar Fisabilillah dan menganjurkan kepada seluruh anggota laskarnya untuk bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia. K. H. Usman Dhomiri kemudian lebih memusatkan perhatiannya pada upaya mengembangkan Tarekat Tijaniyah.



R. Mahar Martanegara Beserta Istri, tanpa tahun.

*Sumber : Perseorangan/Masyarakat*

Raden Mahar Martanegara lahir di Bandung pada 10 Februari 1898 dan wafat pada 1978. Ia adalah salah seorang anak Bupati Bandung, R. A. A. Martanegara. pernikahannya dengan R. Endang Moertasiah, Raden Mahar Martanegara dikaruniai sembilan orang anak. Setelah menyelesaikan pendidikannya, sejak 1934, Raden Mahar berkarier di Cimahi sebagai pegawai Regentschap Werken (Dinas Pekerjaan Umum). Selama berkarier di Dinas Pekerjaan Umum, Raden Mahar pernah ditugaskan sebagai PNS yang diperbantukan kepada Divisi Siliwangi dengan pangkat Kapten Zeni Tutiler dengan tugas di daerah Pangalengan. Pada 1957, Raden Mahar pensiun sebagai PNS.

Pada masa penjajahan Jepang, Raden Mahar bertugas untuk mengatur pasokan air bersih ke asrama militer Jepang. Suatu ketika, ia mematikan pasokan air sehingga membuat penghuni asrama khawatir. Raden Mahar memberikan alasan bahwa terjadi kerusakan pada instalasi air bersih dan para pekerja tidak bisa bekerja cepat karena kehabisan bahan makanan. Mendengar laporan itu, Kepala Asrama Militer Jepang memerintahkan untuk mengirim bahan makanan, tetapi oleh Raden Mahar bahan makanan itu dibagikan kepada rakyat melalui kantor Kawedanaan Cimahi.

Sebagai seorang yang memiliki pendidikan teknik, Raden Mahar memiliki beberapa karya, antara membangun, memelihara, dan memperbaiki beberapa saluran air minum di Kota Cimahi; merancang pembangunan fasilitas tentara di Cileunca pada 1934; merancang panji batalyon-batalyon Teritorium Siliwangi pada masa kepemimpinan A. E Kawilarang; merancang panji Sam Karya Nugraha (penghargaan untuk kodam); dan merancang lambang Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan RSUP Hasan Sadikin.



Pelantikan Walikota Cimahi Ir.H. Itoc Tochija, MM dan Wakil Walikota Dedih Djunaedi yang dipilih langsung oleh DPRD Kota Cimahi, di lantik oleh Gubernur Jawa Barat tahun 2002.

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat*



Pelantikan Walikota Cimahi Dr. Ir.H.M.Itoc Tochija,  
MM dan Wakil Walikota H.Eddy Rachmat, S.Sos  
periode 2007-2012 di Gedung DPRD Kota Cimahi.  
*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat*



Pelantikan Walikota Cimahi Hj. Atty Suharti SE dan Wakil Walikota Drs. Sudiarto, SE, Ak periode 2012-2017 di Gedung DPRD Kota Cimahi.

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat*



Pelantikan Walikota Cimahi Ir. H.Ajay M Priatna,  
MM dan Wakil Walikota Letkol Inf. (Purn.) Ngatiyana  
periode 20017-2022 di Gedung DPRD Kota Cimahi.  
*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat*

# *Keagamaan*



Pada Bab Keagamaan terdapat beberapa arsip, yaitu Surat dari Persatuan Islam ke Muhammadiyah, Masjid Baiturahman, makam KH Usman Dhomiri serta kegiatan pengajian saat HUT Cimahi.

Pada tahun 2019, mayoritas penduduk Cimahi atau sebanyak 521.330 orang merupakan pemeluk agama Islam. Jumlah tersebut berturut-turut diikuti oleh pemeluk agama Protestan sebanyak 22.619 orang, Katolik 8.116 orang, Buddha 908 orang, Hindu 599 orang, dan pemeluk agama lainnya 183 orang. Untuk mendukung praktik keagamaan, terdapat 875 masjid dan mushola, 46 gereja Protestan, 1 gereja Katolik, dan 1 pura di Kota Cimahi.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> BPS, *op.cit.*, hlm. 131-132

PERSATUAN ISLAM TJABANG TJIMANI  
KAMPUNG POBJOK NO: 271/G.  
T J I M A H I

Tjinahi, 4 - 2 - 1960.-

Kepada:

Jth.: Tubana Muhammadiyah  
P.O. Tuban  
Jawa Timur

*Agenda  
549/10-2  
7-2-60*

*1. Berikan qm. Ukhama  
Pial untuk sidang dala  
membayar, maka usulkan  
ket. dapat mendidik kntus  
2. Bidaikan sebagai sega kntus  
maka pembangunan ket.*

Ass. w.w.

Bismillahirrahmanirrahim.

Berdasarkan surat edaran kami tanggal : 4-2-1960  
No.: R-002/B.54957 yang mana maksudnya ialah  
untuk seleksnja kami dapat memulai membangun Masjid Madrasah  
dan Pesantren Persatuan Islam Tjabang Tjinahi, diharap dengan  
sangat beserta keikhlasan hati Bdr2 untuk seleksnja mengirimkan  
rumbangan kepada kami.

Bekian, tidak lain semoga A L L O H memberkati kita bersama,  
dan kami utjapkan banyak terima kasih.-

A m i e n . -

PERSATUAN ISLAM TJABANG TJIMANI

KETUA,

*[Signature]*

H.A. SUBIPTO



BENDAHARA,

A B E N C

PENULIS,

*[Signature]*

A.M. POTROOH

Permohonan sumbangan dari Persatuan Islam Cabang Cimahi  
kepada Cabang PP Muhammadiyah Jakarta untuk pembangunan  
masjid dan pesantren di Cimahi, 4 Februari 1960.

Sumber: ANRI, PP Muhammadiyah Yogyakarta 1922-2001 No. 1451



Masjid Baiturrahman KH. Usman Dhomiri,  
Padasuka Kota Cimahi, 2 Juli 2015.

*Sumber: Dokumentasi Kantor Arsip, Perpustakaan dan  
Pengelolaan Data Elektronik (KAPPDE) Kota Cimahi*



Makam Keluarga KH. Usman Dhomiri, 2 Juli 2015.

*Sumber: Dokumentasi Kantor Arsip, Perpustakaan dan  
Pengelolaan Data Elektronik (KAPPDE) Kota Cimahi*



Makam KH. Usman Dhomiri, salah satu pendiri Laskar  
Hizbullah di Kota Cimahi, 2 Juli 2015.

*Sumber: Dokumentasi Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan  
Data Elektronik (KAPPDE) Kota Cimahi*



HUT Cimahi ke-6 Bersama Ustad Hariri, 2007.

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan kearsipan Provinsi Jawa Barat*

# *Pendidikan*



Pada Bab Pendidikan terdapat 17 arsip, yang terdiri dari 16 arsip yang terdiri dari suasana Sekolah Kader Militer serta perkembangan kampus di Cimahi yaitu dari Akademi Teknik Jenderal Ahmad Yani hingga menjadi Universitas Jenderal Ahmad Yani.

Dari jumlah penduduk Kota Cimahi berumur 15 tahun ke atas, pada tahun 2019 terdapat 41.828 orang tidak/belum pernah sekolah/tidak/belum tamat SD/tamat SD, 48.594 orang lulusan SMP, 140.337 orang tamat SMA, dan 65.754 orang memiliki gelar diploma atau sarjana. Sementara itu, terdapat 48.581 orang murid SD, 18.253 orang murid SMP, dan 8.019 orang murid SMA. Untuk memfasilitasi para murid tersebut, tersedia 73 sekolah di Kota Cimahi yang terdiri atas 125 SD, 36 SMP, 16 SMA, dan 6 perguruan tinggi.<sup>3</sup>

Selain sekolah-sekolah umum, Cimahi juga menjadi lokasi beberapa institusi pendidikan militer yang merupakan peninggalan sejak masa kolonial. Beberapa arsip yang ditampilkan di bawah menunjukkan kegiatan di sekolah-sekolah militer yang berada di Cimahi.

---

<sup>3</sup> BPS, *op.cit.*, hlm. 69-103



Mr. Sartono sedang memeriksa barisan didampingi oleh Panglima TT. III Kolonel Kosasih di Sekolah Kader Infanteri di Cimahi, 1958.

*Sumber: ANRI, Kempen RI Wilayah Jawa Barat No. JB5801/216*

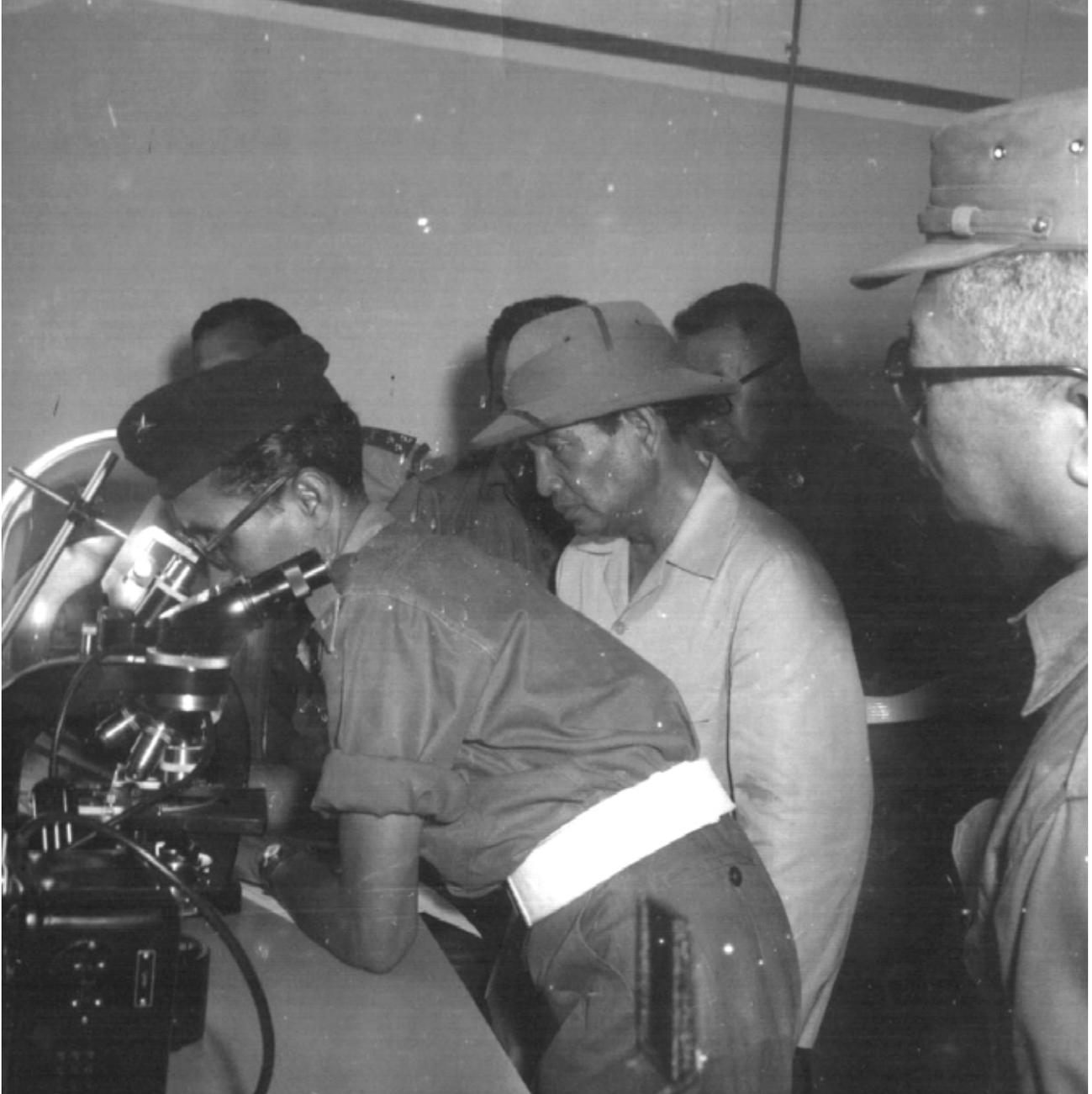


Mr. Sartono menerima penghormatan dari salah satu siswa di Sekolah Kader Infanteri di Cimahi, 1958.

*Sumber: ANRI, Kempen RI Wilayah Jawa Barat No. JB5801/218*



Pejabat Presiden, Mr. Sartono, mengunjungi Sekolah Kader Infanteri di Cimahi, 1958.  
*Sumber: ANRI, Kempen RI Wilayah Jawa Barat No. JB5801/212*



Pejabat Presiden, Mr. Sartono, mengunjungi Sekolah Kader Infanteri di Cimahi. Tampak pada foto, Mr. Sartono sedang berada di laboratorium sekolah, 1958.

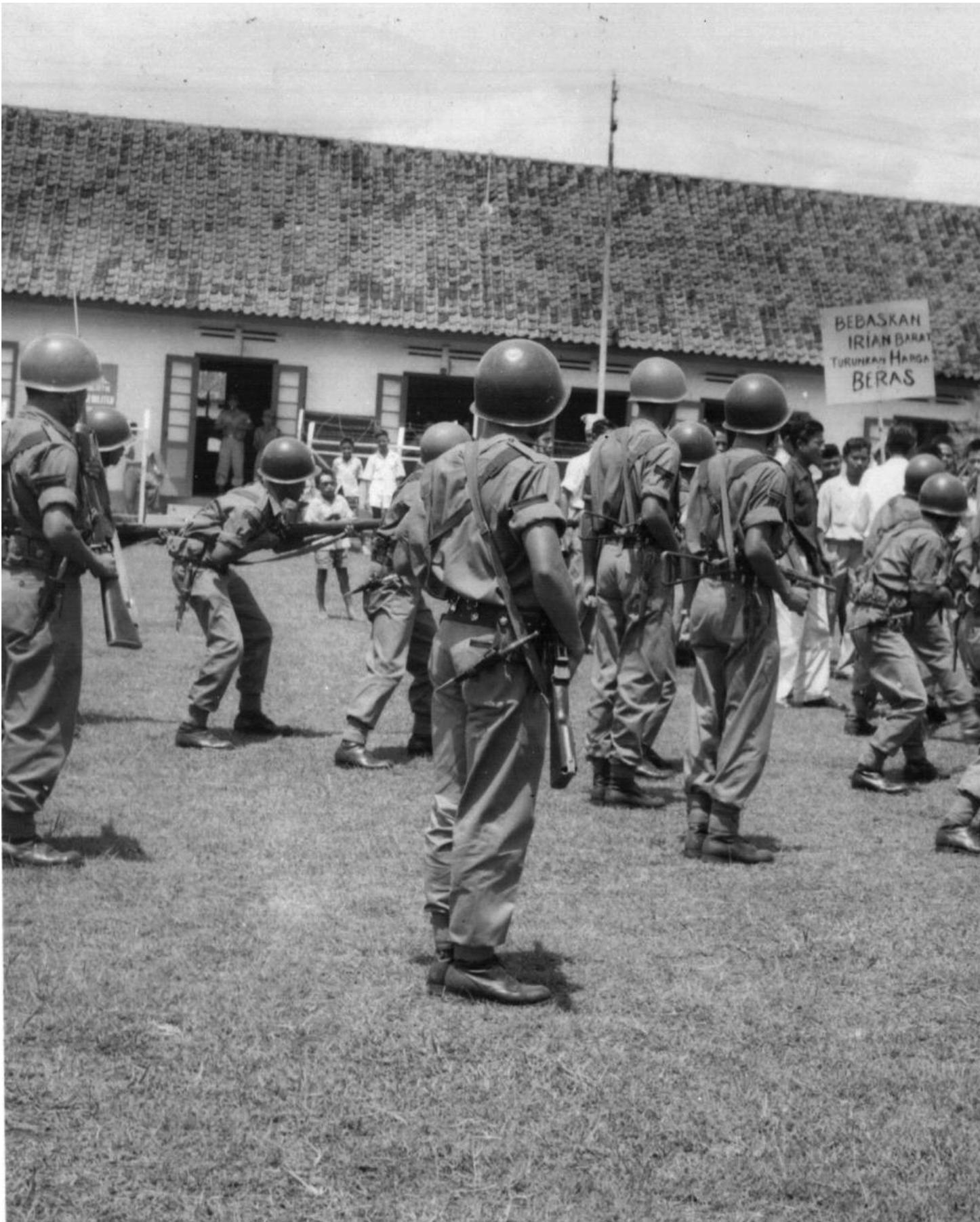
*Sumber: ANRI, Kempen RI Wilayah Jawa Barat No. JB5801/213*



Mr. Sartono menyaksikan latihan perang di Sekolah Kader Infanteri di Cimahi, 1958.

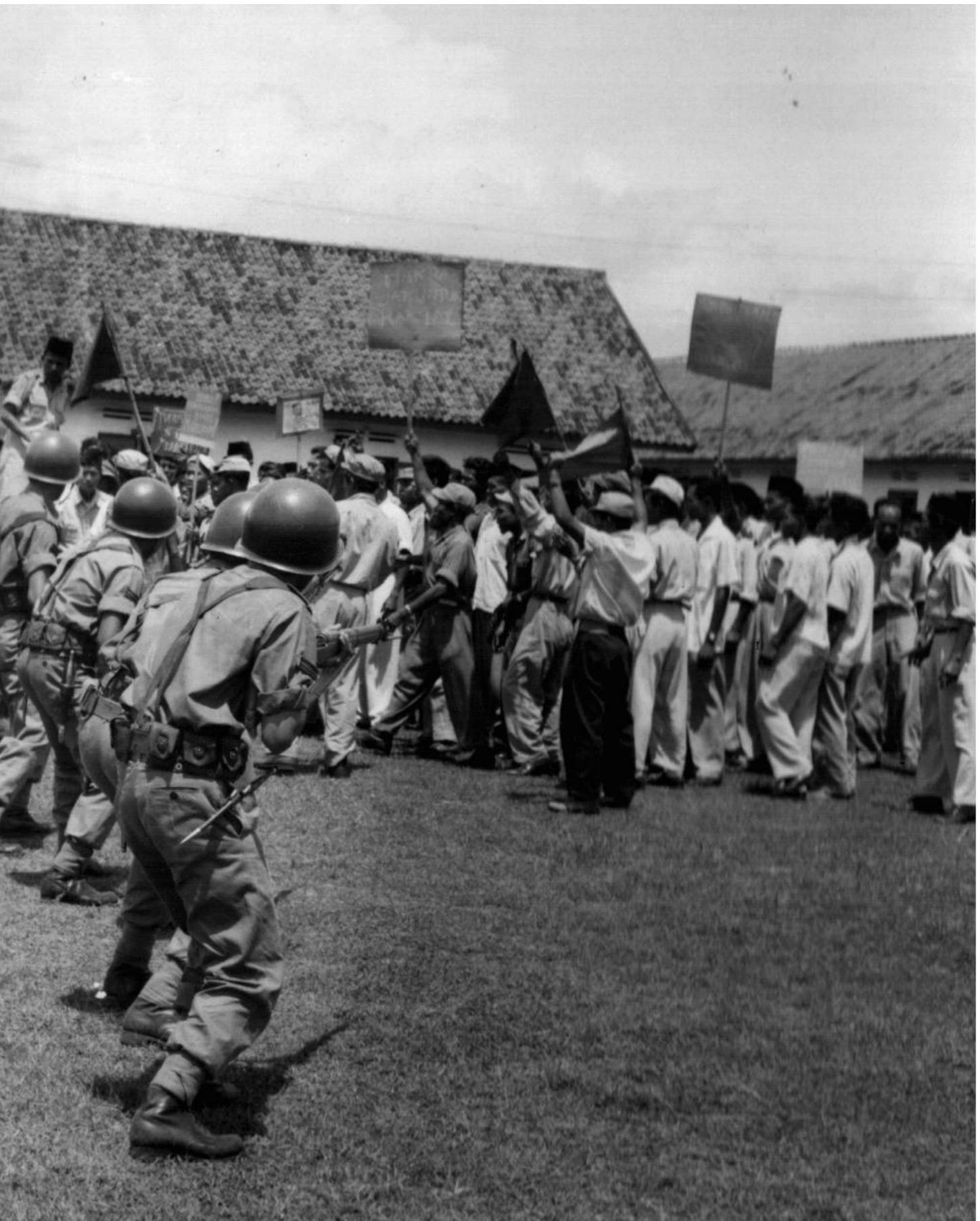
*Sumber: ANRI, Kempen RI Wilayah Jawa Barat No. JB5801/225, 224*





Demonstrasi pembubaran massa di Pusat Pelatihan  
Polisi Militer di Cimahi, 1958.

Sumber: ANRI, Kempen RI Wilayah Jawa Barat No. JB5801/297





Demonstrasi kepandaian naik sepeda motor di Pusat Pelatihan Polisi Militer di Cimahi, 1958.

*Sumber: ANRI, Kempen RI Wilayah Jawa Barat No. JB5801/301*



Demonstrasi kepandaian naik sepeda motor di Pusat Pelatihan Polisi Militer di Cimahi, 1958.

*Sumber: ANRI, Kempen RI Wilayah Jawa Barat No. JB5801/299*



Demonstrasi keahlian menyeberangi sungai oleh para siswa di Pusat Pelatihan Polisi Militer di Cimahi, 1958.

*Sumber: Kementerian Penerangan RI Wilayah Jawa Barat No. JB5801/308, 306*



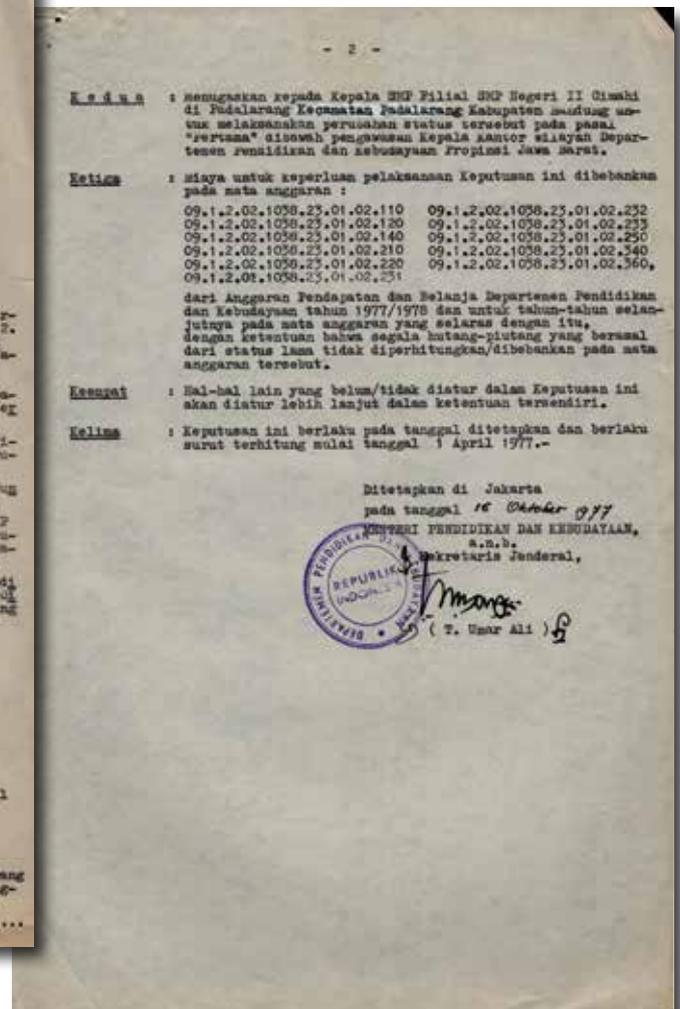
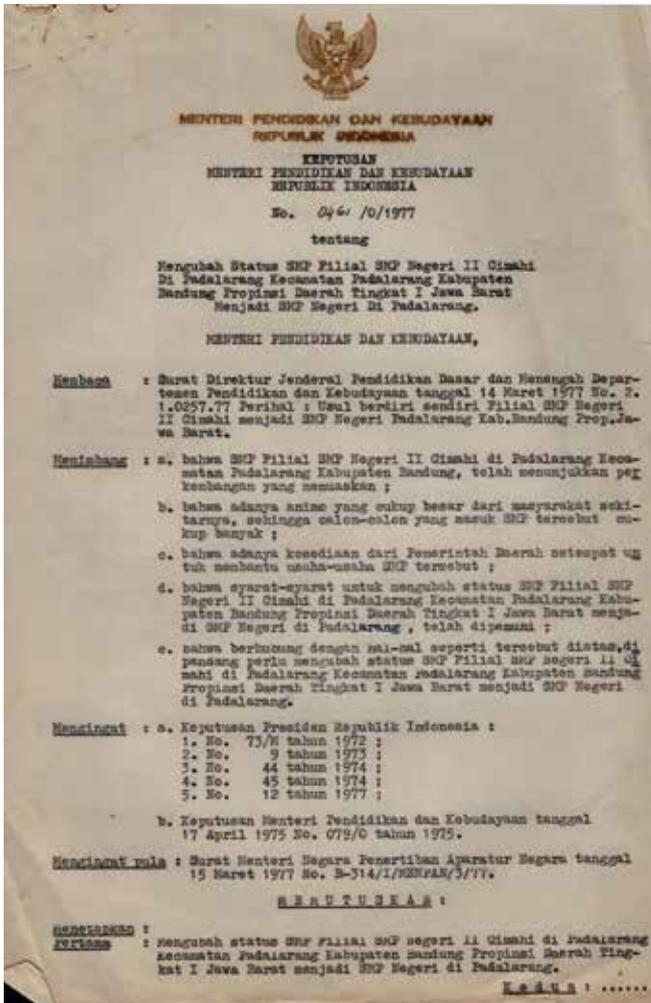


Kunjungan Perdana Menteri (PM) Kamboja, Norodom Sihanouk, ke Sekolah Komando Infanteri (SKI) TT. III di Cimahi. Tampak dalam foto, Norodom Sihanouk sedang memeriksa barisan kehormatan, 1959.  
*Sumber: ANRI, Kempen RI Wilayah Jawa Barat No. JB5901/159*



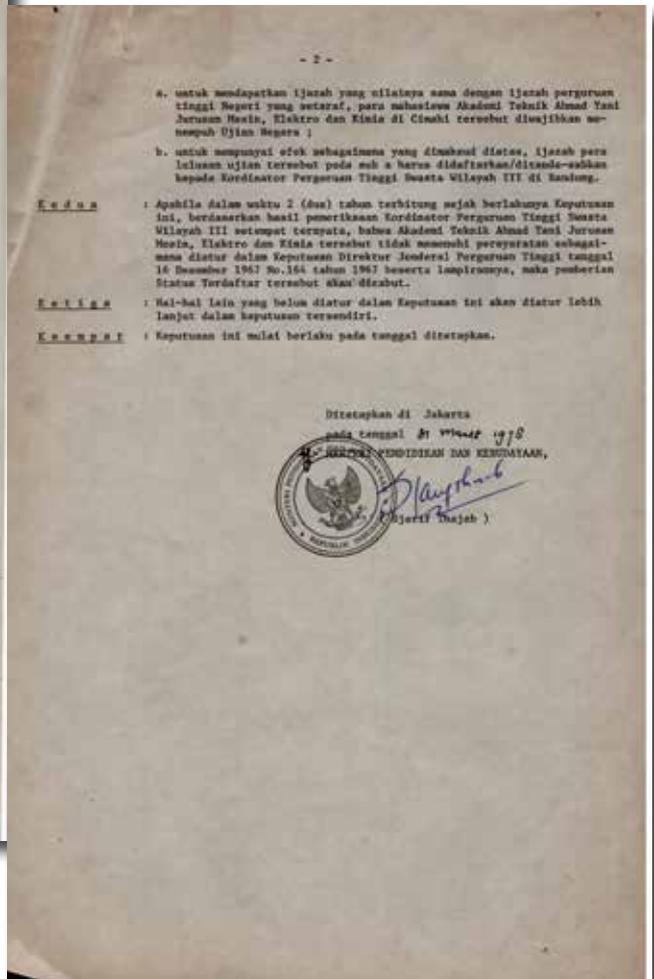
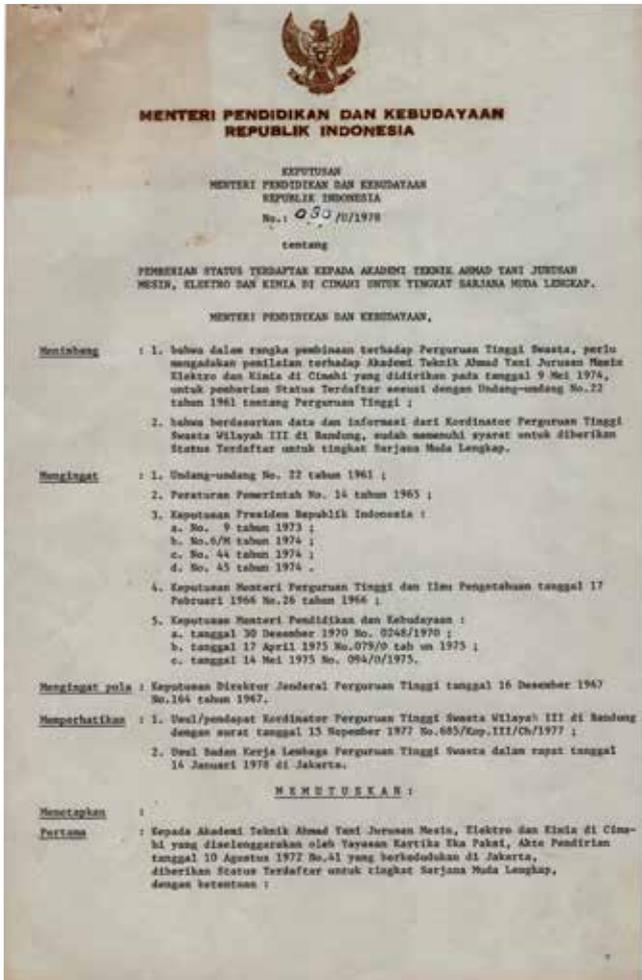
PM Norodom Sihanouk sedang menyaksikan demonstrasi ketangkasan bongkar pasang senjata di Sekolah Komando Infanteri (SKI) TT. III di Cimahi, 1959.

*Sumber: ANRI, Kempen RI Wilayah Jawa Barat No. JB5901/164*

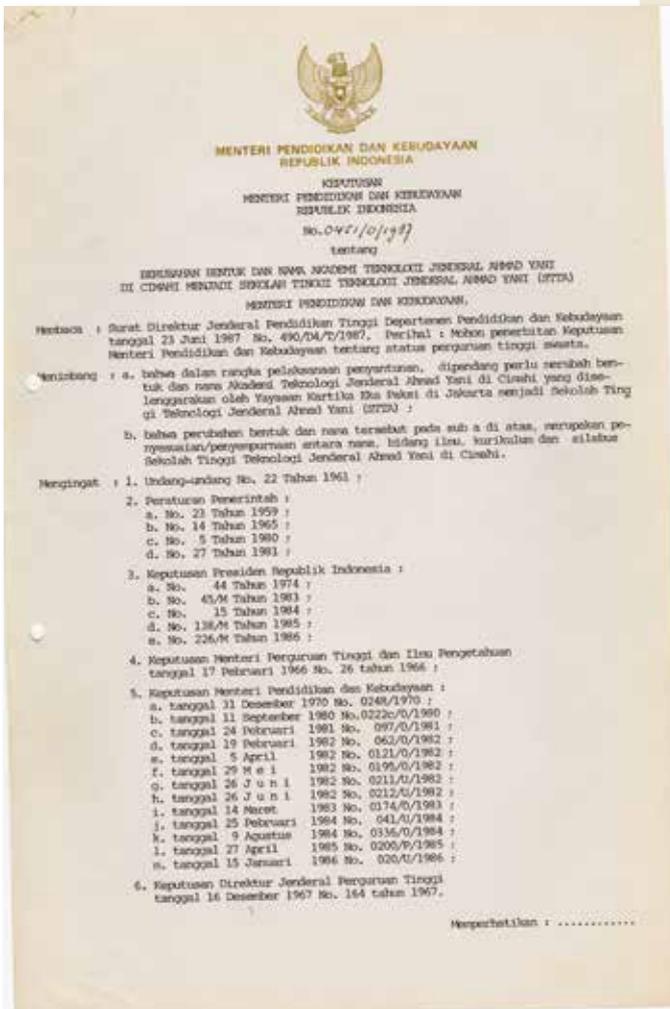


Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0461/O/1977 tentang Mengubah Status SMP Filial SMP Negeri II Cimahi di Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi SMP Negeri di Padalarang. 15 Oktober 1977.

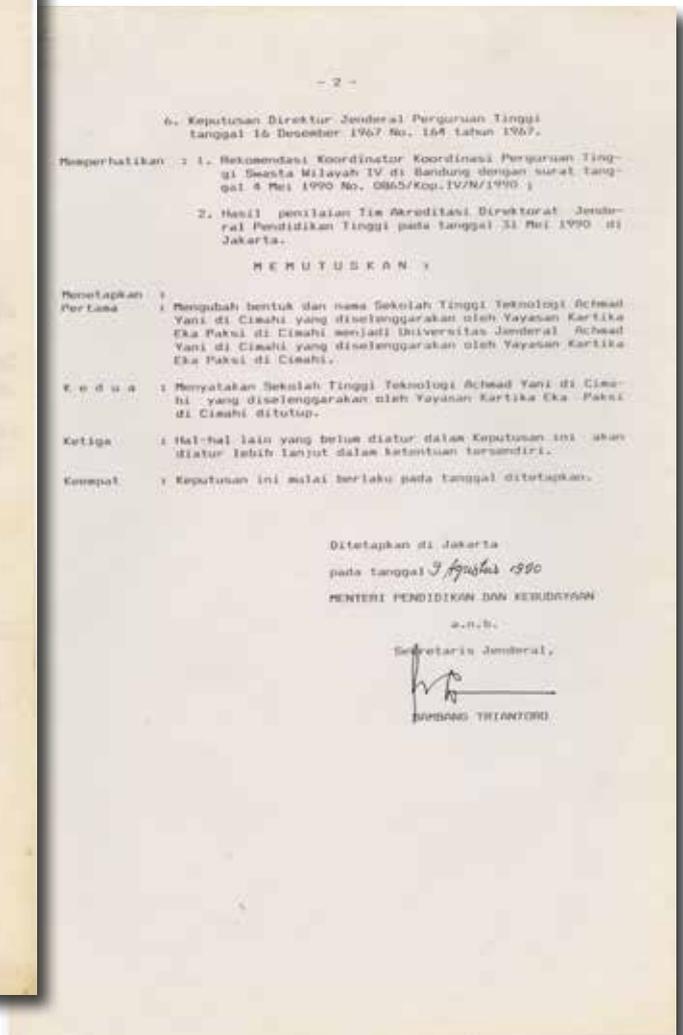
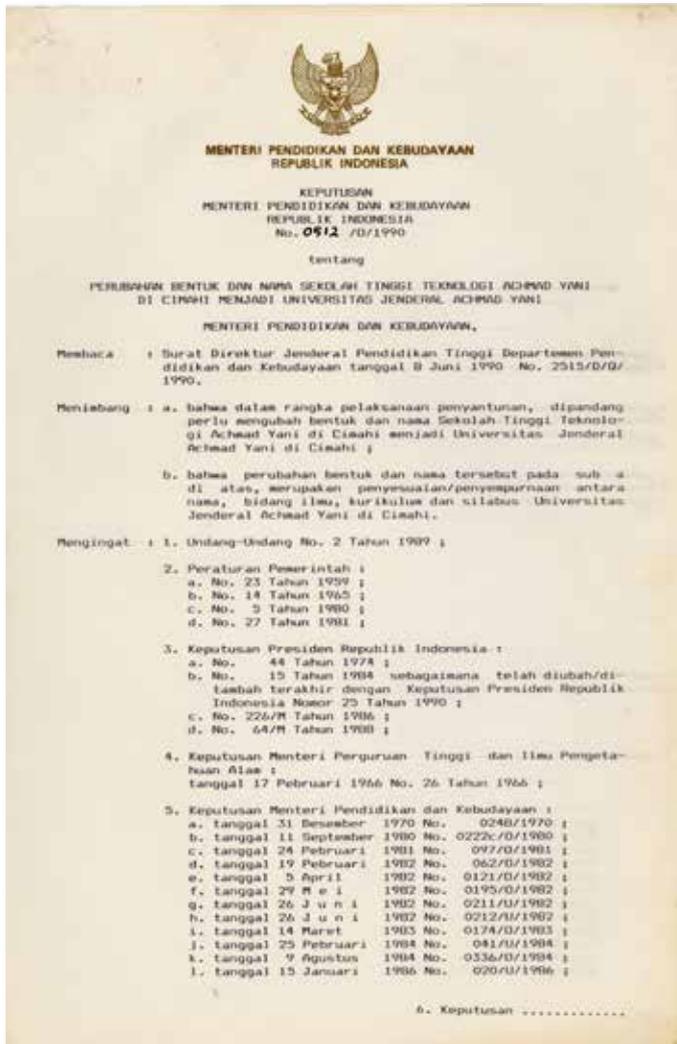
Sumber: ANRI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1959-2010 No. 2321



Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 080/U/1978 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Akademi Teknik Ahmad Yani Jurusan Mesin, Elektro dan Kimia di Cimahi untuk Tingkat Sarjana Muda Lengkap. 31 Maret 1978.  
Sumber: ANRI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1959-2010 No. 2654



Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0451/O/1987 tentang Perubahan Bentuk dan Nama Akademi Teknologi Jenderal Ahmad Yani di Cimahi Menjadi Sekolah Teknologi Jenderal Ahmad Yani (STTA), 1 Agustus 1987.  
Sumber: ANRI, Inventaris Arsip Depdikbud No. 7368 (1959-2010)



Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0512/O/1990 tentang Perubahan Bentuk dan Nama Sekolah Tinggi Teknologi Achmad Yani di Cimahi menjadi Universitas Jenderal Achmad Yani, 9 Agustus 1990.

Sumber: ANRI, Inventaris Arsip Depdikbud No. 8551 (1959-2010)

# *Derekonomian*



Pada Bab Perekonomian menampilkan 6 arsip yang terdiri dari surat pendirian hotel, rumah jagal hingga perkebunan kol. Sebagian besar penduduk bumiputra Cimahi pada masa kolonial, menurut sejarawan Nina Herlina Lubis, bergantung pada sektor pertanian dan perikanan darat. Tanaman yang banyak dibudidayakan adalah padi, jagung, dan ketela. Penduduk juga menanam buah-buahan dan memelihara ternak, seperti unggas, kambing, domba, dan kerbau.<sup>4</sup> Sementara itu, di masa kini, Cimahi terkenal sebagai wilayah pemasok sayur-sayuran.

---

<sup>4</sup> Nina Herlina Lubis, *op.cit.*, hlm. 203

Ontvangen bij de Afdeling *26/4*  
 den Redacteur *Posthuys*  
 Afgedaan door *idem*  
 Geresameert door *Posthuys*

Ontvangen bij den Gouv. Secretaris  
 Afgedaan door hem *2/6 N*

Ag.  $\frac{2111}{99}$   
*173/6 99*  
 (Afd. *D*)

*Mit No. 1262*  
~~*...*~~

# BESLUIT.

*13*  
 Batavia, den 3<sup>de</sup> Juni 1899.

GEARRESTEERD.

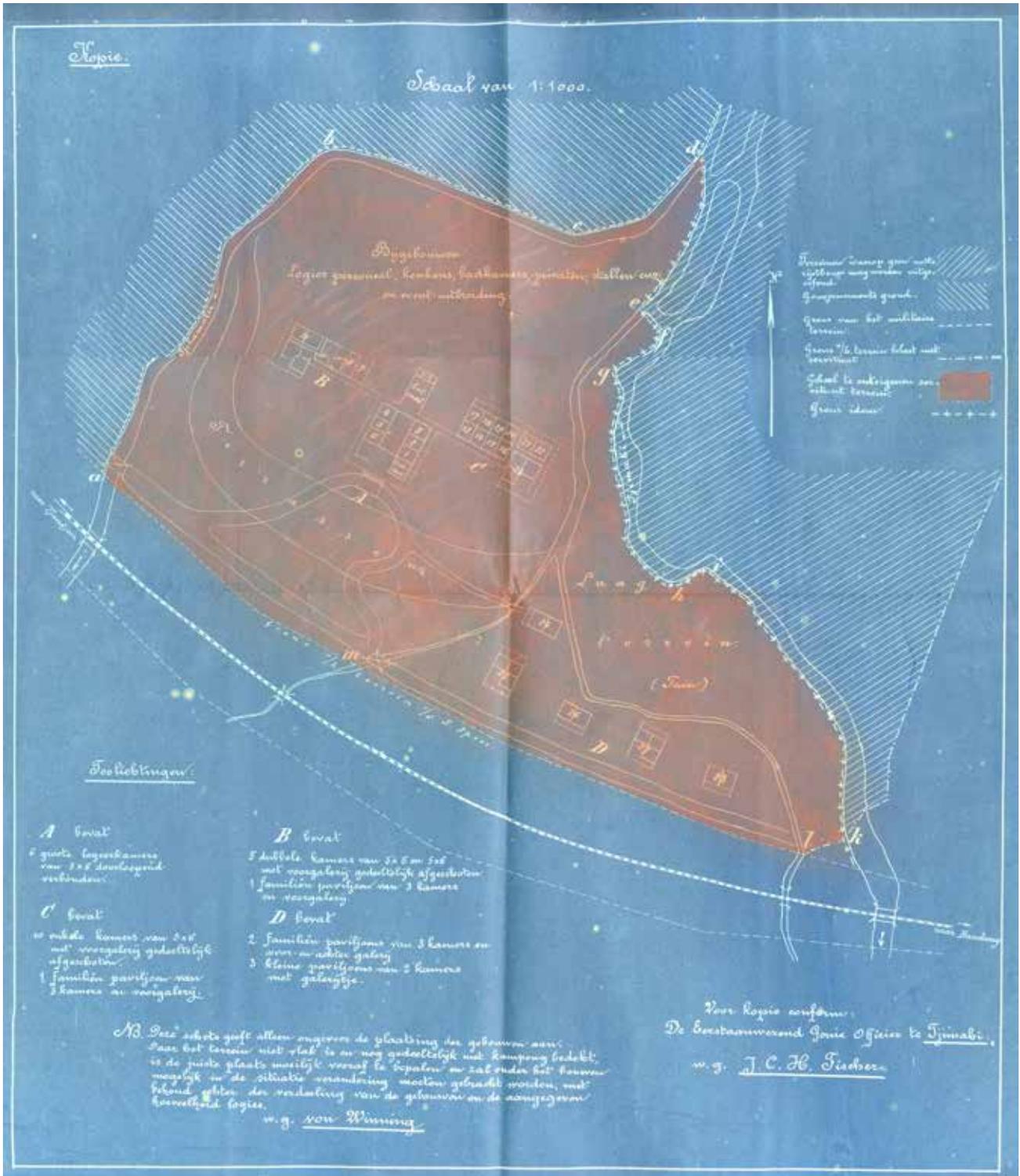
*1/3*

*Cebu*  
 Het besluit, gedagteerd  
 Bandung 25 Maart 1899,  
 van *...*  
 in Gemeente gevestigde  
 Naamloze vennoot-  
 schap, "Hotel en Pension  
 de Kolonie"; *...*  
 houdende o. a. het  
 serieword om, met wijzi-  
 ging van artikel 4 van  
 het besluit  
 van *...*  
 de met hem in zyne  
 naamde *...*  
 overeenkomst van de  
 bouwen van een hotel  
 lussu commercaal.  
 hier te *...*  
*plaats*

REG.  
 EXP.  
 MIN.  
 IND.  
 NOT.  
 O. R.

*566 A.*

Surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 3 Juni 1899 No. 13 mengenai pendirian Hotel dan rumah komensial (di Cimahi rumah sambung spt kontrakan) yang dikerjakan oleh Naamloze Vennootschap Hotel een Pension de Kolonie (terdapat cetak biru situasi daerah yang akan dibangun terdiri dari loji untuk pegawai, dapur, kamar mandi, WC, gudang dll)  
 Sumber : ANRI, GB BT No. 678



Cetak biru mengenai pendirian Hotel dan rumah komensal (di Cimahi rumah sambung spt kontrakan) yang dikerjakan oleh Naamloze Vennootschap Hotel een Pension de Kolonie.

Sumber : ANRI, GB BT No. 678

669 655/12  
 No. 31- K 11/12  
 Het beveling van den  
 Gouverneur-Generaal  
 van Nederlandsch-Indië  
 van 25 Augustus 1928.

Wijziging van de  
 Wet van 11 Augustus 1928  
 No. 1793/II.

Gelezen het schrijven van den Gouverneur-Generaal  
 van 25 Augustus 1928 No. 1970.

Is goedgekeurd en verstaan:

Wet te stellen de volgende ordonnantie om te gelaten, dat  
 zij zal worden afgedrukt door plaatsing in het Staatsblad van  
 Nederlandsch-Indië op deze wijze:

IN SAAL DER BODEMDEEL:

De Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië,  
 Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salmt  
 Onse te weten:

Dat Hij, aan het Regenteschap Buitenzorg wilsende overdragen het  
 aan den Lande bestuursraad alschikende te Tjibaki;

Den Raad van Nederlandsch-Indië gelooft en te overeenstemming  
 met den Willeraad;

Heeft goedgekeurd en verstaan:

Artikel 1.

Aan het Regenteschap Buitenzorg geeft in afgedrukt overdragen  
 het te Tjibaki (residencie Buitenzorg der provincie West-Java) gelooft

A A A

De Bestuurscommissaris  
 van de Bestuurscommissie.

gelezen, aan den Lande bestuursraad alschikende.

Artikel 2.

Gouverneur-Generaal het bepaalt Hij de overdracht/afgedrukt, geeft  
 tevens deze ordonnantie in werking met ingang van den dag van dien  
 daer afgedrukt.

In opdat niemand hiervan overtuiging voorkomt, zal deze in  
 het Staatsblad van Nederlandsch-Indië worden geplaatst.

Gedaan te Tjibaka, den 25sten Augustus 1928.

Van Weende: Te schrijven als volgt:

A A A

den Willeraad.

De Gouverneur-Generaal heeft wilsende de ordonnantie in  
 deze overdracht aan het Regenteschap Buitenzorg van het aan de Lande  
 bestuursraad (Residencie Buitenzorg) Buitenzorg H. Jansz & Co.  
 te Batavia\* bestuursraad te Tjibaki gelooft alschikende.

De Gouverneur-Generaal  
 van Nederlandsch-Indië,  
 (ing) de Graaff

Afschrift deze zal worden gezonden aan den Raad van Neder-  
 landsch-Indië, het inlichting en mitrecht verstaan van den Re-  
 geringscommissaris voor de Bestuurscommissie en den Gouverneur  
 van West-Java, het inlichting en verstaan.

Heeft overten het verstaan te weten  
 De Gouverneur-Generaal,

*[Handwritten Signature]*

Peraturan Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengenai pendirian rumah jagal ternak di Cimahi, 25 Agustus 1928.  
 Sumber: ANRI, Binnenlandsch Bestuur No. 375



Pemandangan kebun kol di Cimahi, [1930].  
Sumber: ANRI, KIT Jawa Barat No. JB5201/639, 640



Para petani sedang memanen kol  
di perkebunan di Cimahi, [1930].

*Sumber: ANRI, KIT Jawa Barat No. JB5201/641*



# *Kemiliteran*



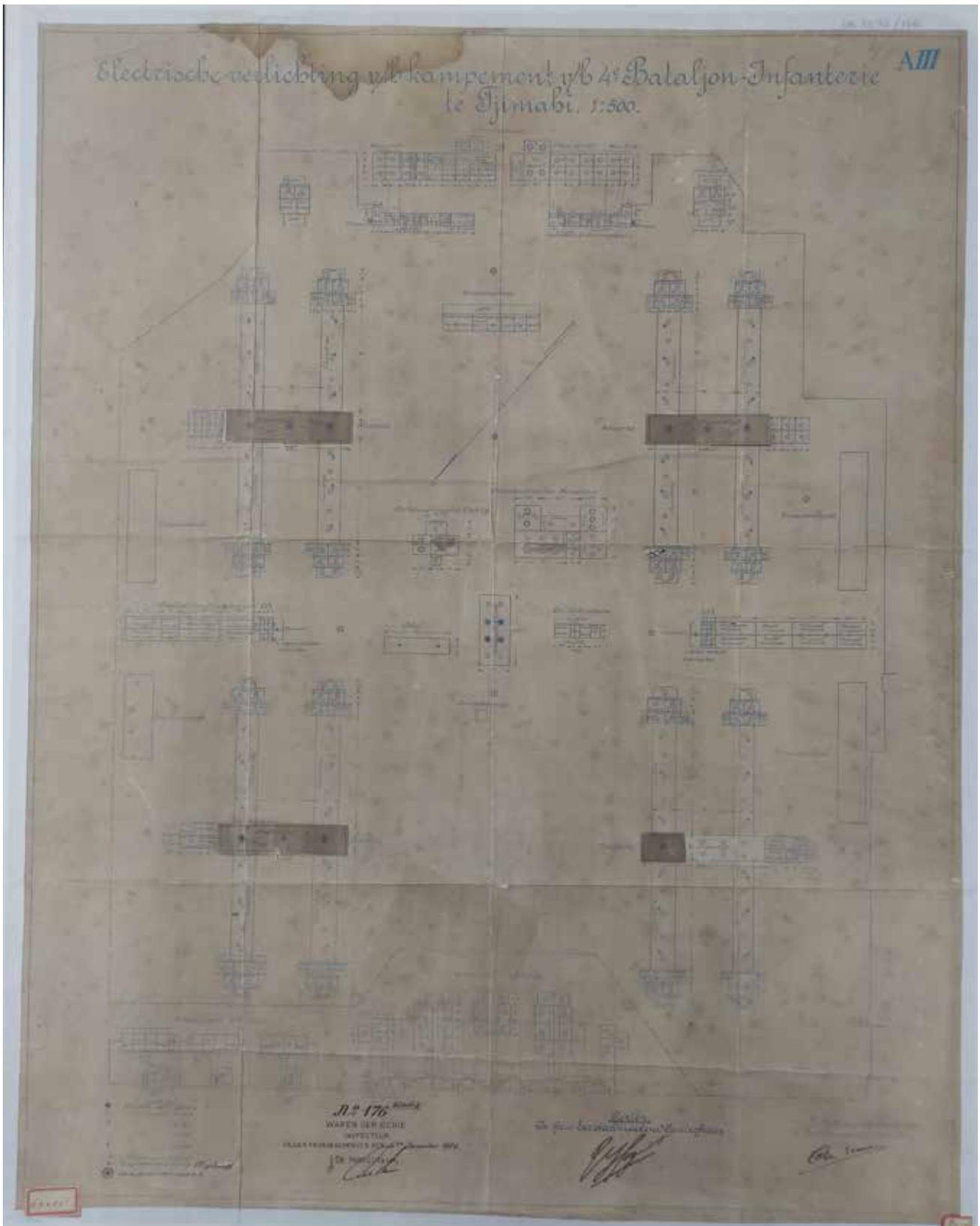
Pada Bab Kemiliteran terdiri dari 22 arsip antara lain foto berbagai fasilitas militer di Cimahi, seperti tempat pembuatan senjata, tempat latihan hingga kantin militer. Selain itu juga terdapat surat permohonan tahanan militer untuk ikut berjuang di Irian Barat.

Popularitas Kota Cimahi sebagai kota militer tidak bisa dilepaskan dari sejarah kota tersebut dan kaitannya dengan sejarah wilayah-wilayah di sekitarnya, terutama Bandung. Masa pemerintahan Herman W. Daendels menjadi titik tolak perkembangan wilayah Bandung. Pembangunan *Grote Postweg* (Jalan Raya Pos) tidak melewati Karapyak (Dayeuhkolot), ibu kota Kabupaten Bandung saat itu, sehingga Daendels memerintahkan Bupati Bandung untuk memindahkan ibu kota ke wilayah yang dilewati jalan raya. Berdasarkan perintah tersebut, Bupati Bandung R.A. Wiranatakusumah II kemudian memindahkan ibu kota Kabupaten Bandung dari Karapyak ke sebelah utara Jalan Raya Pos di tepi sungai Cikapundung.<sup>5</sup>

---

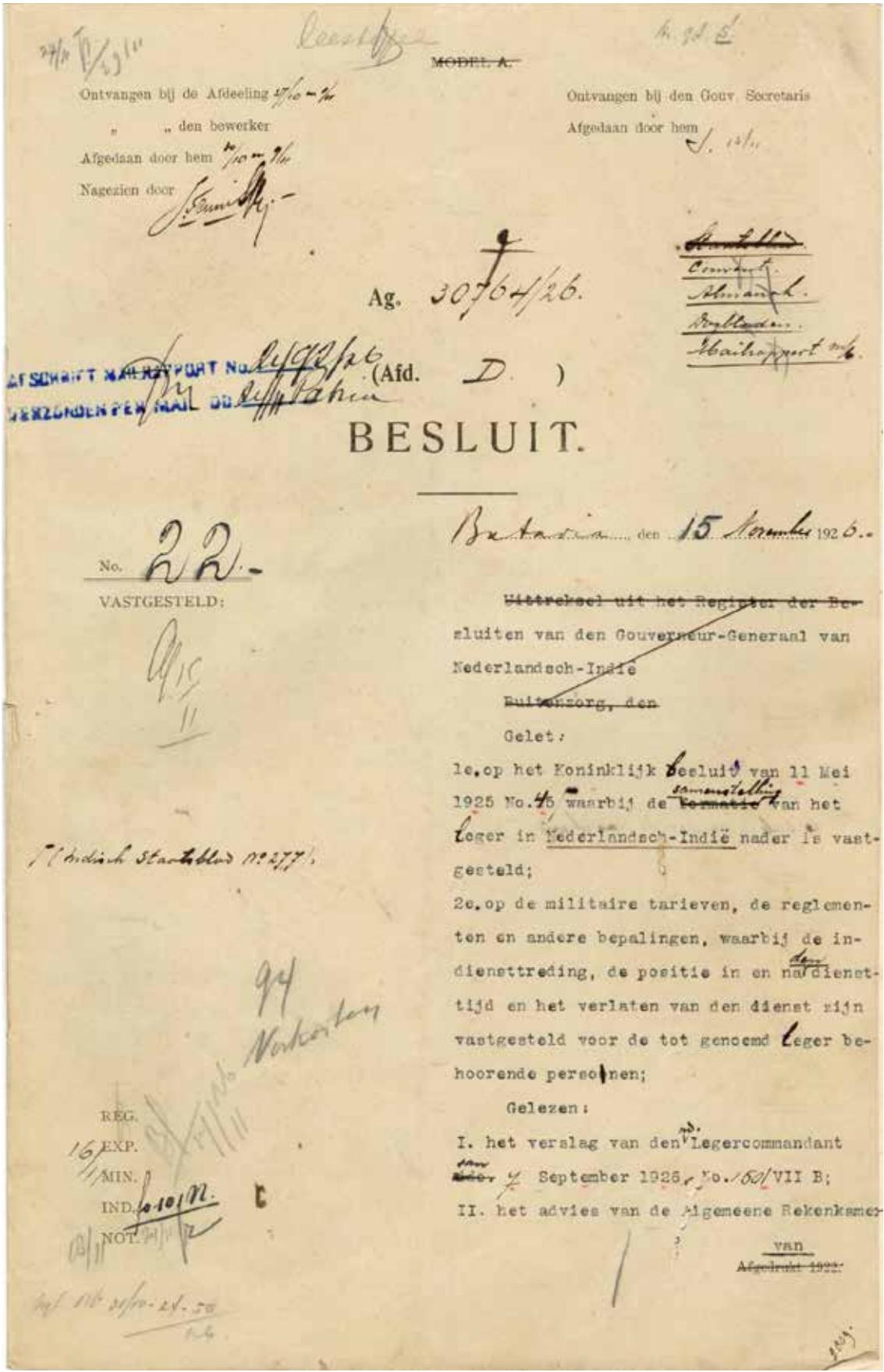
<sup>5</sup>Nandang Rusnandar, "Sejarah Kota Bandung dari "Bergdessa" (Desa Udik) menjadi Bandung "Heurin Ku Tangtung" (Metropolitan), Patanjala Vol. 2, No. 2, Juni 2010, hlm. 278-279





Gambar denah sistem elektrik untuk penerangan di sebuah kamp Batalyon Infanteri, 1924.

Sumber : ANRI, DVO 3532



Surat keputusan Gubernur Jendral tanggal 15 November 1926 No. 22 tentang penetapan fasilitas pencucian militer yang ditujukan untuk membersihkan tekstil rumah sakit dan perabotan beserta peraturan turunan lainnya.  
Sumber : ANRI, GB BT No. 2548

Cimahi, tgl. 25 November 1957

**KERADAPAN**  
**PADA JAWA MUDA PERTIWI REP. INDONESIA**  
**di**  
**DJAKARTA.**

Dengan segala hormat.

1. Atas nama seluruh Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia (Darat, Laut dan Udara) yang pada domain ini berada dalam Ekoran / Hutan di Rumah Tahanan Tentara Cimahi disebabkan soal perkara Kriminal, beben S.O.B. ;

2. Dengan adanya peristiwa IRIAN BARAT, dan dengan keinginan, kami bermohon dimajukan dalam daftar untuk dengan SUSA SUSA menjerba IRIAN BARAT, bila harus diambil dengan bantuan senjata ;

3. Permohonan yang kami persembahkan ini, berdasarkan Fakta yang Mula sebagai Pengujian Tertinggi, mohon mendapat perhatian.

4. Sebelumnya kami persembahkan tulisan lain tak berhitung. -

Hormat kami  
 Atas nama seluruh yang insyaf,  
 - W. U. FAHMANI. -  
 KOPR. R.P.K.I.A.D.-

KABINET PRESIDEN  
 NO. 16.909/1957  
 19.12.57

**TUJUAN KEPADA :**

1. Jh. Pd. Jh. Menteri Pertahanan R.I. di-Djakarta.
2. Jh. Kepala Staf Angkatan Darat R.I. di-Djakarta.
3. Jh. Pd. Jh. Menteri Kehakiman. R.I. di-Djakarta.
4. Jh. Penglima P.T.I.IV di-Bandung.
5. --- A r c h i v e s ---

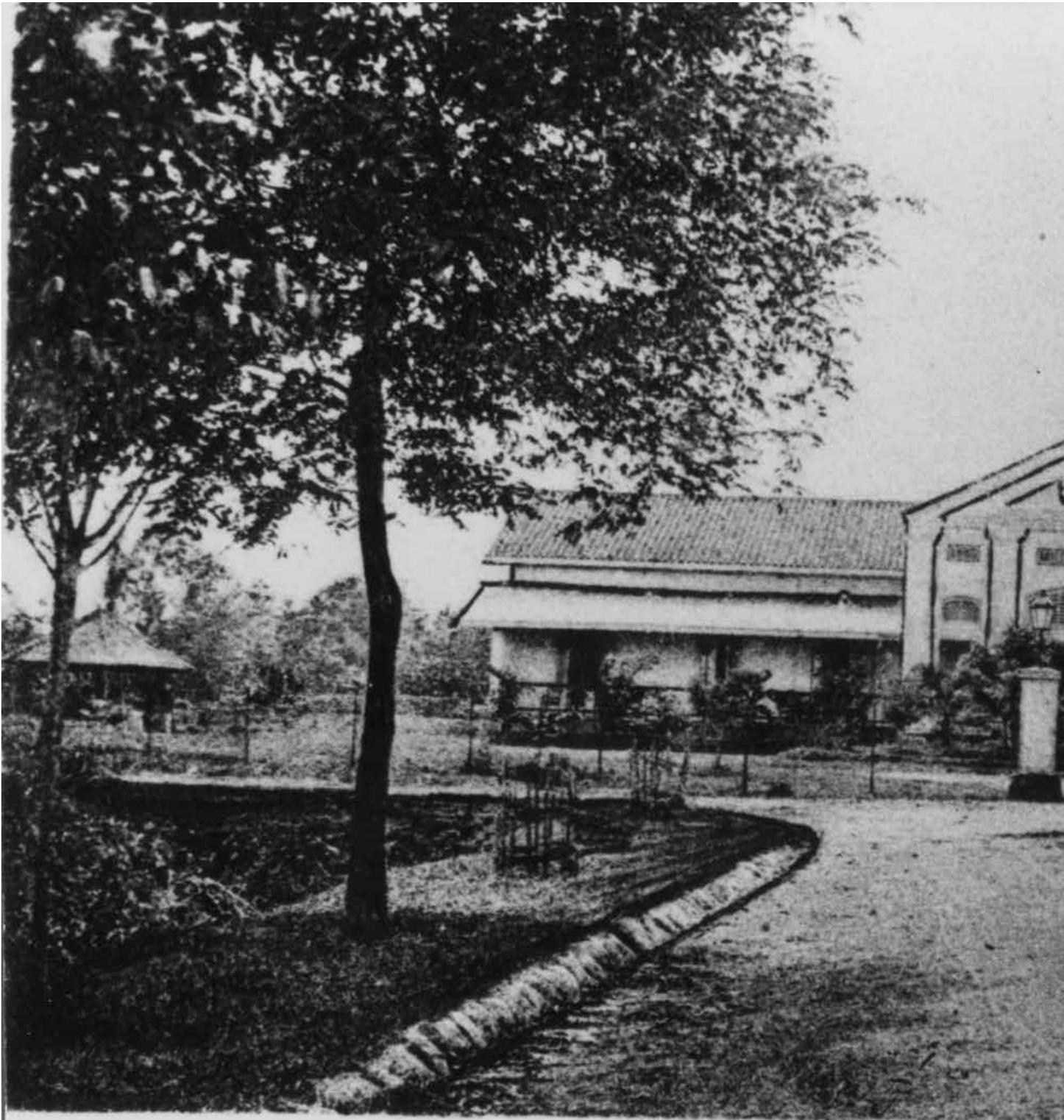
**DAFTAR NAMA ANGG. ANG. PERANG. R.I. Tahanan/HUKUMAN JAWA MUDA (SUSA SUSA) DI RUMAH TANGHAN TIRAN M. -**

NO.	NAMA	PANGKAT	KELOMPOK	ALAMAT
1.	W.O. Parobelahi.	Kopral.	R. P. K. A. D.	(Tahanan 'a).
2.	S.P. Sankis.	Kopral.	R. P. K. A. D.	(Tahanan 'a).
3.	Suzinda.	Serdad.	R. P. K. A. D.	(Tahanan 'a).
4.	Selason.	Kopral.	R. P. K. A. D.	(Tahanan 'a).
5.	Harsono.	Kopral.	R. P. K. A. D.	(Tahanan 'a).
6.	Sudjana.	Kopral.	R. P. K. A. D.	(Tahanan 'a).
7.	A. S. S. S.	Kopral.	R. P. K. A. D.	(Tahanan 'a).
8.	Wener.	Prid.	Kelompok. B.	(Tahanan 'a).
9.	Samudra.	Prid.	Sn. Inf. 304.	
10.	A. Hamid.	Pid.	Polatib. S.K.I.	
11.	Ali. Sembur.	Prid.	P.T.I. III.	
12.	R. S. S.	Prid.	Det. Sub. 303.	
13.	Uba Arifanang.	Prid.	R.I. 103.	
14.	H. Quridang.	Prid.	P.P. Kevalemi.	
15.	Harsono.	Prid.	Sn. Inf. 304.	
16.	Indran.	Prid.	Sn. Inf. 309.	
17.	Sudjo Sukro.	Serdad.	K. S. S. S. S.	
18.	Sudjono.	Pid.	P.P. Kevalemi.	
19.	Asap Hidayat.	Prid.	Det. Sub. III.	
20.	J. Sulbutu.	Prid.	Sn. Inf. 300.	
21.	Achmad.	Prid.	Sn. Inf. 310.	
22.	Salimur. Harag.	Prid.	329.	
23.	M. Samsudin.	Serdad.	Det. 22.VI.	
24.	J. Sulman.	Prid.	Sn. Inf. 309.	
25.	S. Kurnadja.	S. S. S. S.	Det. Sub. 303.	
26.	Toddy. Sukmana.	Prid.	Det. Sub. III.	
27.	Harsono.	Prid.	Det. Sub. III.	
28.	Sudjono.	S. S. S.	Det. Sub. 303.	
29.	Sudjono.	Ltd.	Det. Sub. 303.	
30.	Sudjono.	Serdad.	Polatib. S.K.I.	
31.	Sudjono.	Serdad.	P.P. Kevalemi.	
32.	Abd. Harjo.	Kopral.	Sn. Inf. 309.	
33.	Sudjo Subandi.	Serdad.	P. S. S. S. S.	
34.	Mad. Ali.	Prid.	K. S. S. S. S.	
35.	Harsono.	Prid.	Det. Sub. III.	
36.	Abd. Harjo.	Prid.	Sn. Inf. 309.	
37.	Sudjono.	Prid.	Sn. Inf. 309.	

Bandoedjar, 25 Nov 1957.

Atas nama seluruh yang insyaf,  
 - W. U. FAHMANI. -  
 KOPRAL. R.I.A.D.-

Anggota APRI tahanan/hukuman rumah penjara tentara Cimahi: surat tanggal 25 November 1957 tentang permohonan menjadi sukarelawan dalam menyerbu Irian Barat.  
 Sumber : ANRI, Kabinet Presiden RI No. 2108



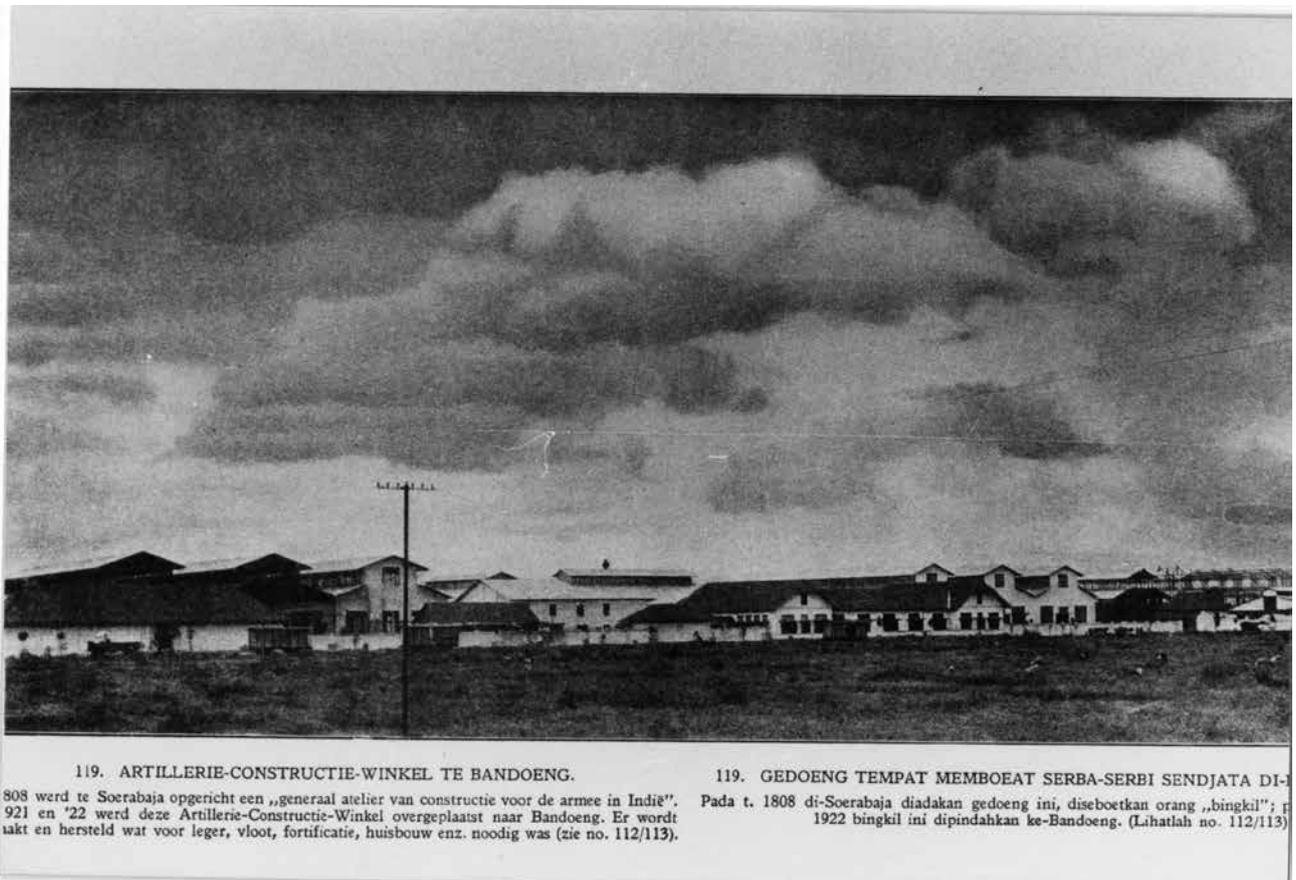
Groet uit Bandoeng.

Gedung utama kantin militer di Cimahi, Jawa Barat [1930].

*Sumber : ANRI, KIT Jawa Barat No 32-68*



**Militaire Kantine Tjimahi.**



119. ARTILLERIE-CONSTRUCTIE-WINKEL TE BANDOENG.

1808 werd te Soerabaja opgericht een „generaal atelier van constructie voor de armee in Indië”. In 1921 en '22 werd deze Artillerie-Constructie-Winkel overgeplaatst naar Bandoeng. Er wordt nu vakkant en hersteld wat voor leger, vloot, fortificatie, huisbouw enz. noodig was (zie no. 112/113).

119. GEDOENG TEMPAT MEMBOEAT SERBA-SERBI SENDJATA DI-

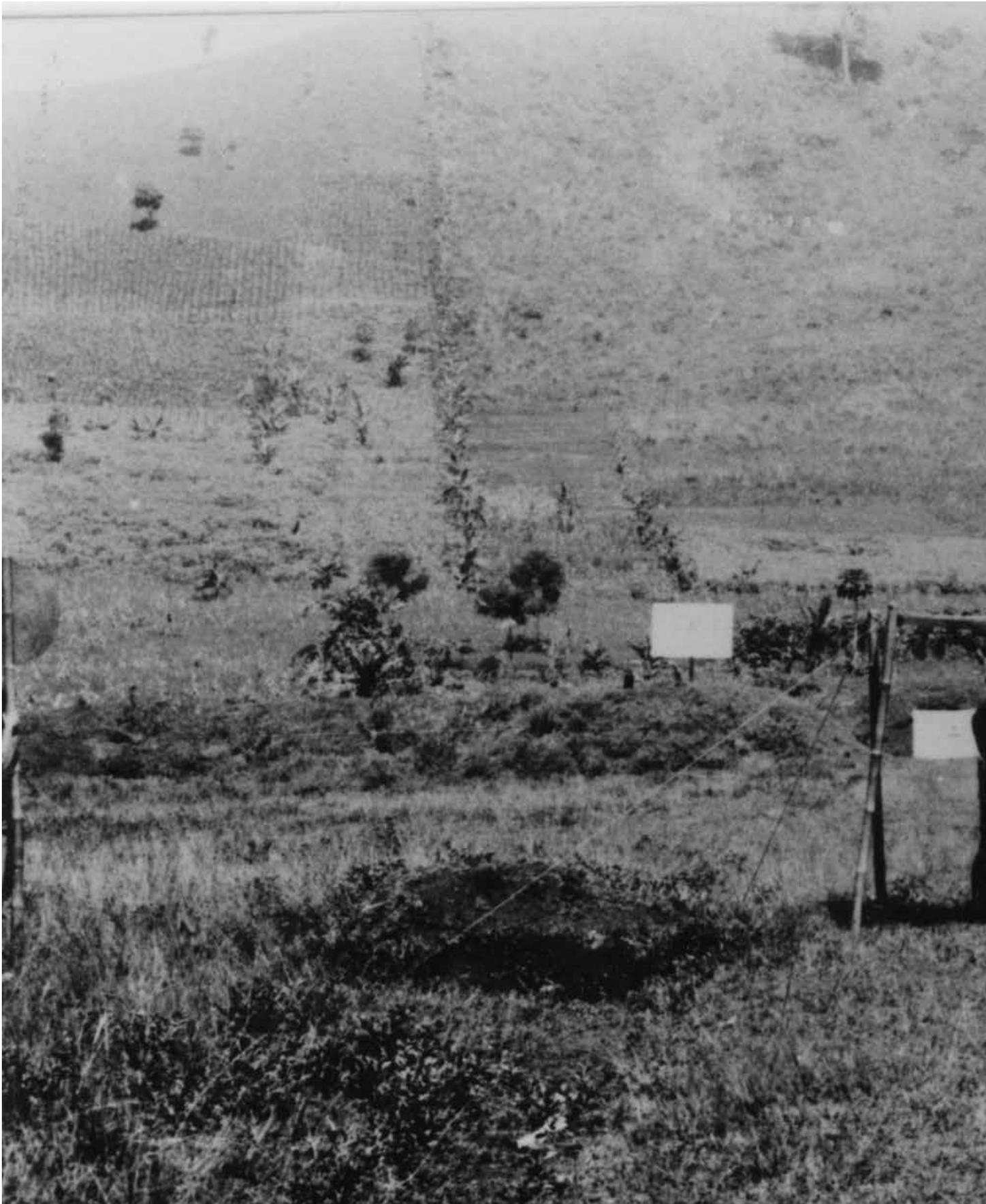
Pada t. 1808 di-Soerabaja diadakan gedoeng ini, diseboetkan orang „bingkil”; pada t. 1922 bingkil ini dipindahkan ke-Bandoeng. (Lihatlah no. 112/113)

Gedung tempat membuat senjata di Cimahi, Bandung, Jawa Barat, [1930].

Sumber : ANRI, KIT Jawa Barat No 64-63

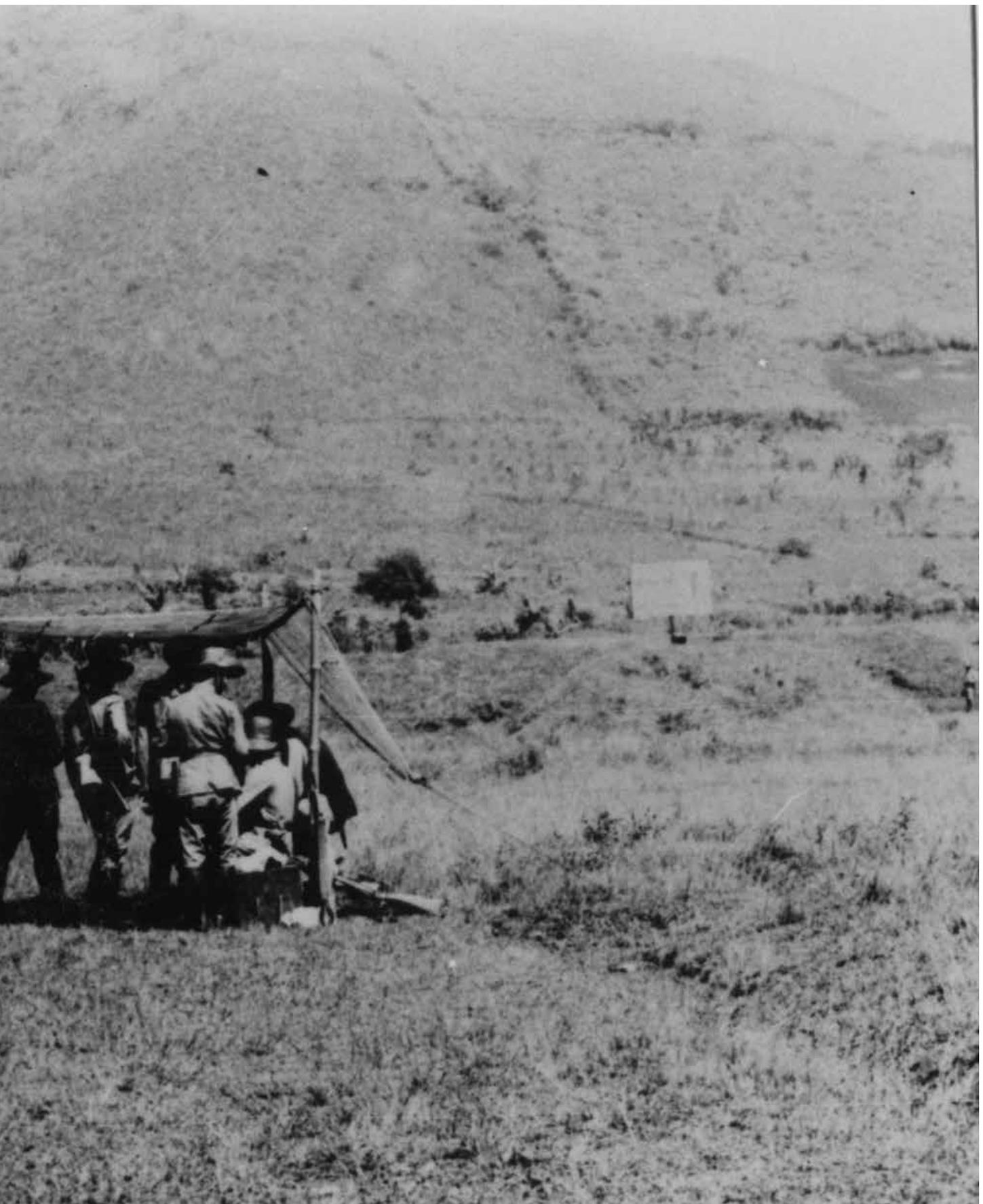


Potret tentara zeni yang berbasis di Cimahi, [1930].  
Sumber : ANRI, KIT Jawa Barat No 334-4, 334-6



Pemandangan lapangan tembak dekat Cimahi, para tentara sedang berteduh di bawah kemah, Jawa Barat, [1931].

*Sumber : ANRI, KIT Jawa Barat No 335-16*





Daeng Muhammad Ardiwinata  
Komandan Korem 063 Sunan Gunung Jati Pertama, [1949].  
*Sumber : Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi*



Daeng Muhammad Ardiwinata Berfoto  
Bersama Dengan Latar Mobil, [1949].

*Sumber : Perorangan/Masyarakat*



Daeng Muhammad Ardiwinata Berfoto Bersama, [1949].  
*Sumber : Perorangan/Masyarakat*



Daeng Muhammad Ardiwinata Bersalaman di tempat tugas yang baru Komandan KOREM 063SGJ, [1949].  
*Sumber : Perorangan/Masyarakat*



Latihan ketentaraan di Cimahi  
dengan menggunakan tank, 1952.  
*Sumber: Kementerian Penerangan RI Wilayah Jawa Barat*  
No. JB5202/479, JB5202/482, JB5202/481





Latihan ketentaraan di Cimahi, 1952.

*Sumber: Kementerian Penerangan RI Wilayah Jawa Barat No. JB5202/483*





Brigadir Jenderal Gatot Soebroto, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, membesuk Direktur Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Letnan Kolonel Mokoginta, yang sedang dirawat di Rumah Sakit Tentara di Cimahi, 1958.

*Sumber: Kementerian Penerangan RI Wilayah Jawa Barat No. JB5802/255, 258*



Brigadir Jenderal Gatot Soebroto, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, membesuk Direktur Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Letnan Kolonel Mokoginta, yang sedang dirawat di Rumah Sakit Tentara di Cimahi, 1958.

*Sumber: Kementerian Penerangan RI Wilayah Jawa Barat No. JB5802/256, 257*

# *Infrastruktur*



Pada Bab Infrastruktur terdiri dari 13 arsip meliputi berbagai foto jembatan, sekolah, rumah sakit jalan hingga rumah anggota militer serta gapura batas kota Cimahi. Kota Cimahi sebagai sebuah garnisun militer pada masa kolonial meninggalkan berbagai infrastruktur penunjang aktivitas kemiliteran, seperti rumah sakit, sekolah, dan penjara. Disebutkan oleh sejarawan Nina Herlina Lubis, pada tahun 1887 pemerintah Hindia Belanda mendirikan Rumah Sakit Militer di Cimahi sebagai upaya awal untuk mengembangkan Cimahi sebagai pusat komando militer Hindia Belanda. Pembangunan tersebut kemudian dilanjutkan hingga Cimahi menjadi sebuah garnisun militer terbesar di Hindia Belanda<sup>6</sup> yang dilengkapi dengan tangsi, pabrik senjata, dan penjara militer. Garnisun militer di Cimahi diresmikan pada September 1896 sebagai pusat komando pengendalian pasukan serta koordinasi, mobilisasi, dan pengerahan pasukan.<sup>7</sup> Warisan kemiliteran di Cimahi masih bertahan hingga sekarang dan dapat dilihat dari institusi-institusi kemiliteran yang masih ada, seperti Rumah Sakit Dustira dan Pusat Pendidikan Polisi Militer.

---

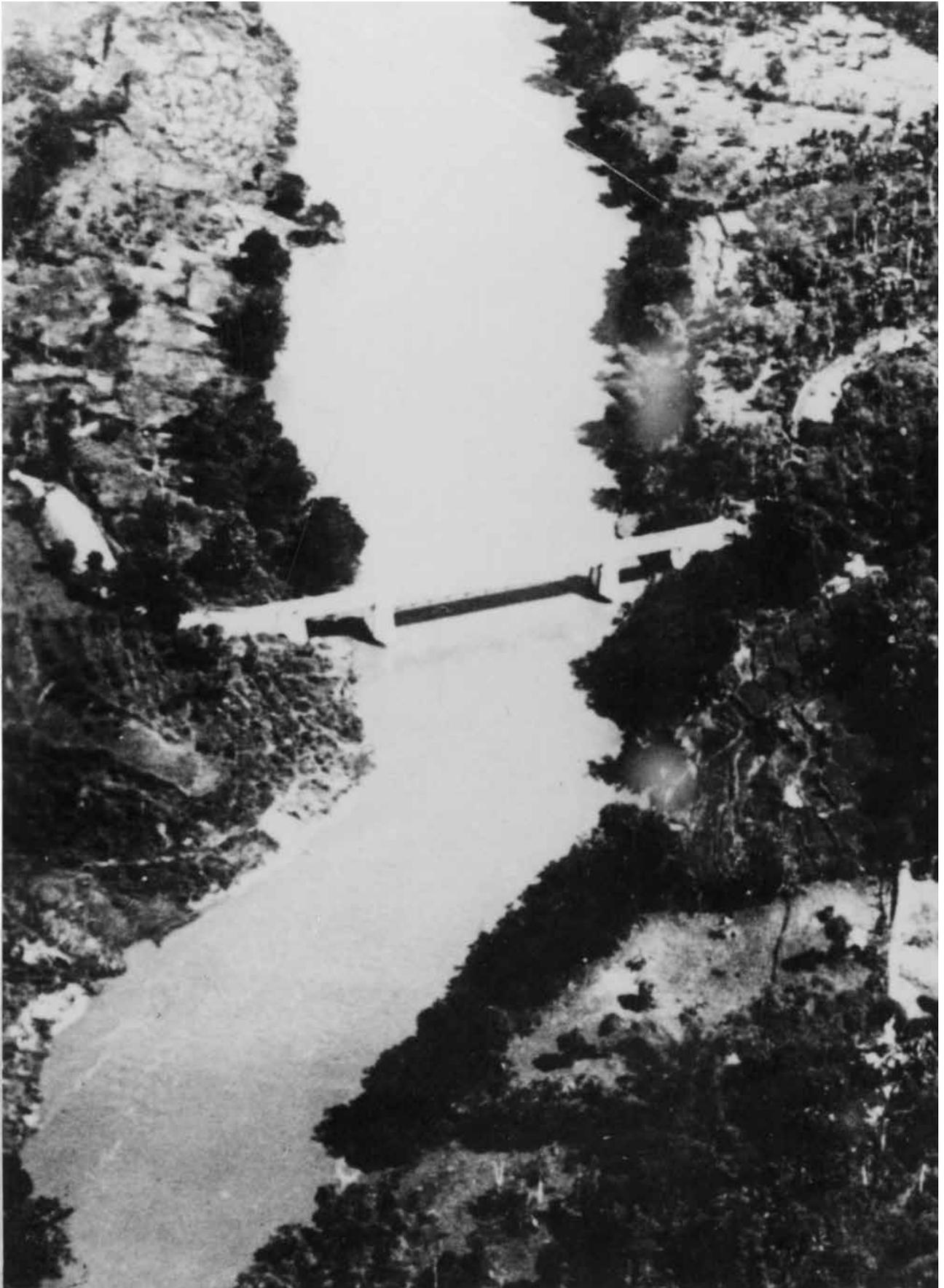
<sup>6</sup> Nina Herlina Lubis, *op.cit.*, hlm. 43

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 45



Jembatan kecil dan para pekerja di Cimahi, Jawa Barat, [1930].  
Sumber : ANRI, KIT Jawa Barat No 527-60





Jembatan di Kali Citarum yang menghubungkan  
Batujajar-Cimahi, Jawa Barat.[1930]  
*Sumber : ANRI, KIT Jawa Barat No 517-38*



Interior dapur dan perlengkapannya di Sekolah Masak, Cimahi, Jawa Barat, [1930].

*Sumber : ANRI, KIT Jawa Barat No 686-51*



Interior rumah dokter di Cimahi, Jawa Barat, [1930].

*Sumber : ANRI, KIT Jawa Barat No 687-58*



Bagian dalam rumah dokter di Cimahi, [1930].

*Sumber : ANRI, KIT Jawa Barat No 687-60*



Suasana rumah seorang letnan militer di Cimahi, [1930].

*Sumber : ANRI, KIT Jawa Barat No 687-64*



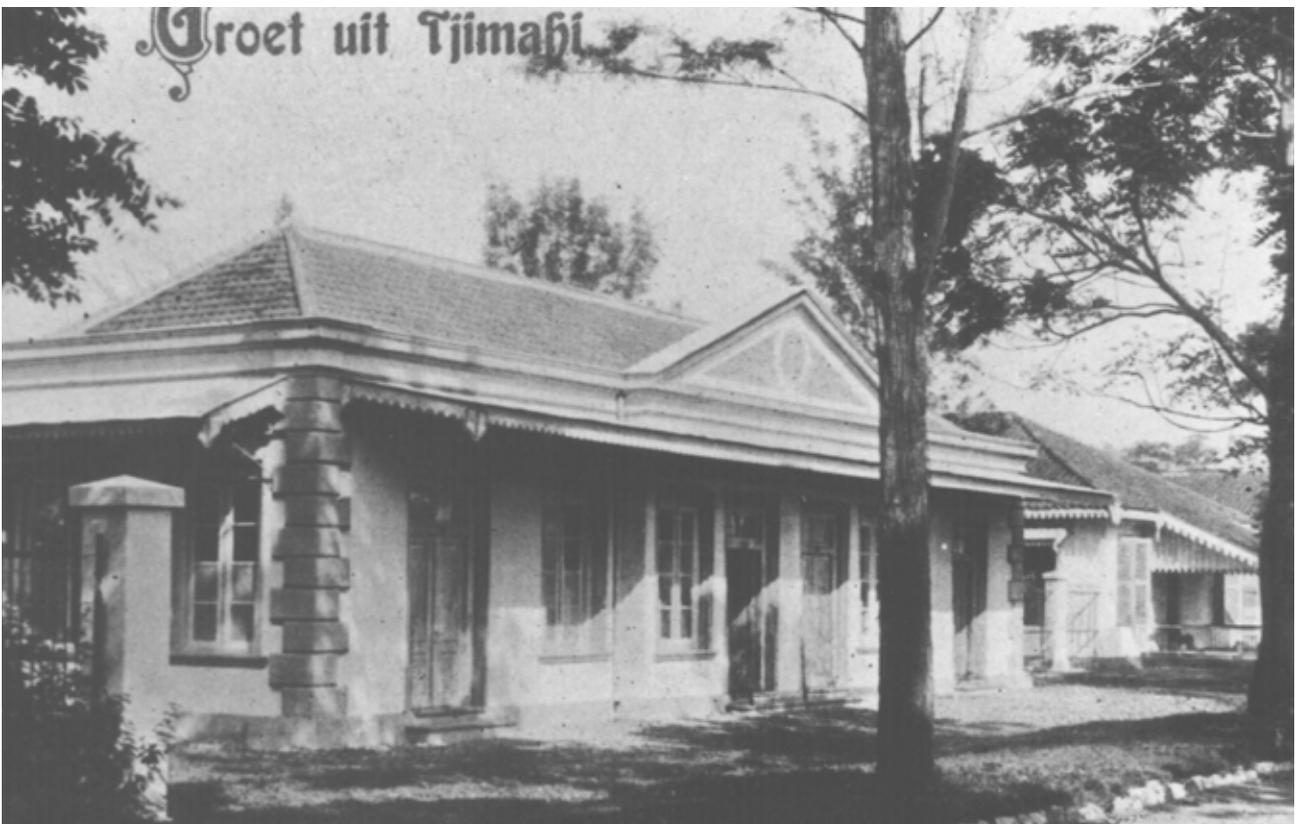
Suasana rumah seorang letnan militer di Cimahi, [1930].

Sumber : ANRI, KIT Jawa Barat No 687-66



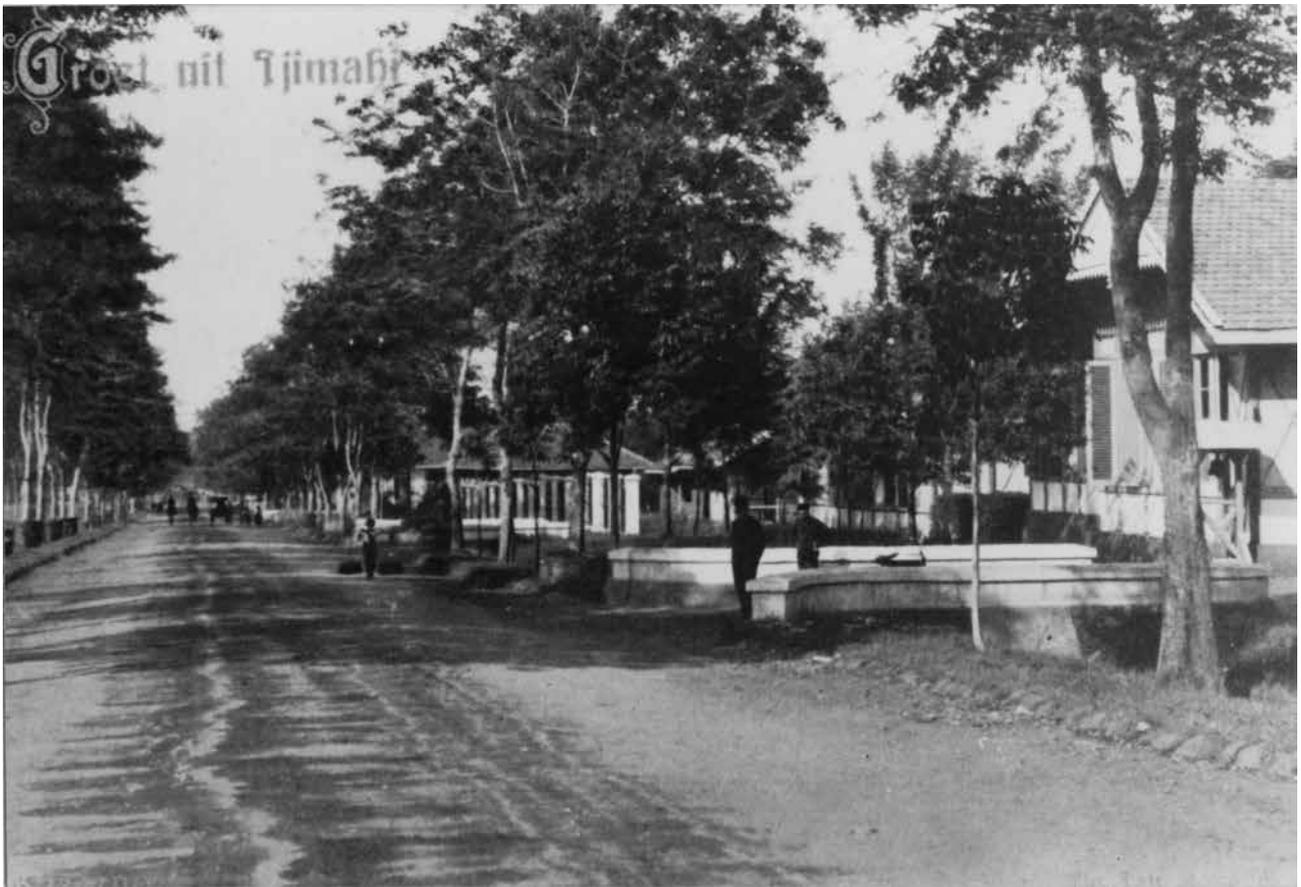
Rumah militer Cimahi, Jawa Barat, [1930].

*Sumber : ANRI, KIT Jawa Barat No. 827-39*



Bangunan rumah sakit di Cimahi, [1930].

*Sumber: KIT Jawa Barat No. 1121/24*



Jalan di daerah tangsi, Cimahi, Jawa Barat.[1930]

*Sumber : ANRI, KIT Jawa Barat No 1121-26*

**SALINAN.**

BALINDA, 16 OKTOBER 1950.

No. 3900/PAN/Batasia.

Lampiran: -  
Perihal: Susunan militer K.L. bagian Anson yang berada di Kamp I dan Kamp II Tjilandi.

Kepada  
Jth. Pd. Tuan Kepala Pemilik  
Kapolisan Djawa-Barat (bagian P.A.W.) di BANDUNG.

Menarik surat kami tanggal 10 Oktober 1950 No. 3900/PAN/Batasia dengan isi dipertahankan dengan hormat, bahwa tidak ada dalam Kamp yang berada dalam kota Bandung keadaannya memuaskan, tetapi dalam Kamp tersebut dicita pun setelah peristiwa di Kamp Bandung keadaannya meruntuh pulu, bahkan dapat dikatakan lebih berkecukupan, sehingga rajat yang berada dikekeliling Kamp itu menjadi ketakutan dan salarikan diri.

Sebelum soal-mulanya peristiwa ini adalah sebagai berikut:

Sebelum Anson yang berada di Kamp II Tjilandi tidak mau dipindahkan ke Kamp I (Bantokamp), oleh karena mereka mempunyai tjariga, bahwa jika mereka dikumpulkan di satu tempat dengan mudah TNI dapat beraksi, maka setelah itu mulai terjadi peristiwa ini pada tanggal 10 Oktober 1950.

Kedua Kamp itu mengadakan persiapan diabolis-linaria, dikarenakan diingit ada orang yang provokatif diantaranya yang memberitahu berita, bahwa kedatangan Jenderal Mayor SCHOFFELAAR itu, akan memerintahkan untuk mengumpulkan semua sandiwa yang berada pada mereka, yang mana mereka tidak inginkan.

Langkat ketika Pembesar Tentara Belanda itu, setelah mengadakan persiapan dalam Kamp Iab. hendak meninggalkan Kamp itu, dihalangi dan tidak diperkenankan keluar oleh serdadu Anson yang berada dalam Kamp tersebut, sehingga Jenderal Mayor SCHOFFELAAR terpaksa tinggal di situ selama 2 hari.

Berhubung dengan dikehendaki Pembesar itu, Kapitan Militer Belanda mengadakan konferensi seluruh serdadu, untuk bertukar pikiran perlu terhadap serdadu Anson tersebut.

Oleh karena setelah 2 hari Jenderal Mayor SCHOFFELAAR dibebaskan kembali, setelah yang disantingnya militer Belanda itu dibatalkan, dan Pembesar tersebut bertetapi melanjutkan serdadu yang dipangah oleh serdadu Anson dalam Kamp tersebut.

Peristiwa ini sebagai pembongkar gedung sandiwa diantaranya Kamp, dikarenakan oleh hal tersebut dikehendaki:

- a. Tidak ada sandiwa yang dapat oleh militer Belanda, sebab jika hal itu terjadi berarti bahwa mereka itu diserahkan kepada APRI yang mana mereka tidak inginkannya.
- b. Tidak mau dimajukan di sini melainkan mengunduki jika mereka ke Anson, sehingga ke lain atau ke Belanda.

YTHUSAN: dibagikan dengan hormat kepada:

1. Pd. T. Kepala Djawatan Kepolisian Indonesia di Djakarta;
2. Pd. T. Kepala Agung di Djakarta;
3. T. Kepala Seksi I Div. Siliwangi di Bandung;
4. T. Kepala Seksi I KEM di Bandung;
5. Pd. T. Komandan CPMS Bat. III di Bdg.

A. N. Kepala Kepolisian  
Keresidanan Priangan  
Kuala bagian P.A.W.  
tid.  
(N. JAWANG RAJAPRANTHA)  
Kaulingia Mula Polisi.

**SALINAN.**

Bandung, 16 Oktober 1950.

No. : 3900/PAN/Batasia

Lampiran: -  
Perihal: Susunan militer K.L. bagian Anson yang berada di Kamp I dan Kamp II Tjilandi.

Kepada  
Jth. Pd. Tuan Kepala Pemilik  
Kapolisan Djawa-Barat (bagian P.A.W.) di BANDUNG.

Menarik surat kami tanggal 10 Oktober 1950 No. 3900/PAN/Batasia, dengan isi dipertahankan dengan hormat, bahwa tidak ada dalam Kamp yang berada dalam kota Bandung keadaannya memuaskan, tetapi dalam Kamp tersebut dicita pun setelah peristiwa di Kamp Bandung keadaannya meruntuh pulu, bahkan dapat dikatakan lebih berkecukupan, sehingga rajat yang berada dikekeliling Kamp itu menjadi ketakutan dan salarikan diri.

Sebelum soal-mulanya peristiwa ini adalah sebagai berikut.

Sebelum Anson yang berada di Kamp II Tjilandi tidak mau dipindahkan ke Kamp I (Bantokamp), oleh karena mereka mempunyai tjariga, bahwa jika mereka dikumpulkan di satu tempat dengan mudah TNI dapat beraksi, maka setelah itu mulai terjadi peristiwa ini pada tanggal 10 Oktober 1950.

Kedua Kamp itu mengadakan persiapan diabolis-linaria, dikarenakan diingit ada orang yang provokatif diantaranya yang memberitahu berita, bahwa kedatangan Jenderal Mayor SCHOFFELAAR itu, akan memerintahkan untuk mengumpulkan semua sandiwa yang berada pada mereka, yang mana mereka tidak inginkan.

Langkat ketika Pembesar Tentara Belanda itu, setelah mengadakan persiapan dalam Kamp Iab. hendak meninggalkan Kamp itu, dihalangi dan tidak diperkenankan keluar oleh serdadu Anson yang berada dalam Kamp tersebut, sehingga Jenderal Mayor SCHOFFELAAR terpaksa tinggal di situ selama 2 hari.

Berhubung dengan dikehendaki Pembesar itu, Kapitan Militer Belanda mengadakan konferensi seluruh serdadu, untuk bertukar pikiran perlu terhadap serdadu Anson tersebut.

Oleh karena setelah 2 hari Jenderal Mayor SCHOFFELAAR dibebaskan kembali, setelah yang disantingnya militer Belanda itu dibatalkan, dan Pembesar tersebut bertetapi melanjutkan serdadu yang dipangah oleh serdadu Anson dalam Kamp tersebut.

Peristiwa ini sebagai pembongkar gedung sandiwa diantaranya Kamp, dikarenakan oleh hal tersebut dikehendaki:

- a. Tidak ada sandiwa yang dapat oleh militer Belanda, sebab jika hal itu terjadi berarti bahwa mereka itu diserahkan kepada APRI yang mana mereka tidak inginkannya.
- b. Tidak mau dimajukan di sini melainkan mengunduki jika mereka ke Anson, sehingga ke lain atau ke Belanda.

A. N. Kepala Kepolisian Keresidanan Priangan Kuala bagian P.A.W.  
tid.  
(N. JAWANG RAJAPRANTHA)  
Kaulingia Mula Polisi.

YTHUSAN dibagikan dengan hormat kepada:

1. Pd. T. Kepala Djawatan Kepolisian Indonesia di Djakarta.
2. Pd. T. Kepala Agung di Djakarta.
3. T. Kepala Seksi I Div. Siliwangi di Bandung.
4. T. Kepala Seksi I KEM di Bandung.
5. Pd. T. Komandan CPMS Bat. III di Bandung.

Terbilang oleh,

Surat-surat mengenai keadaan verzaelings Kamp V atau Batalyon VII Bandung serta Kamp I dan Kamp II di Cimahi, Oktober 1950.  
Sumber: Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri RI 1950-1959 No. 1489

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 116 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan pada organisasi Angkatan Perang perlu menetapkan pangkat effectief bagi para anggota dalam Angkatan Darat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950;  
2. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950, Bab II Pasal 9 dan 10;
- Mendengar : pertimbangan Menteri Pertahanan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Memberikan pangkat effectief LETNAN KOLONEL kepada :

Dr. KORNEL SINGAWINATA

(Serie A. No. 64) dalam jabatannya sebagai Kepala Rumah Sakit Tentara di Tjimahe;

dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.  
Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertahanan,
2. Kepala Staf Angkatan Perang,
3. Kepala Staf Angkatan Darat,
4. Kepala Staf Angkatan Laut,
5. Kepala Staf Angkatan Udara,
6. Kepala Staf "A" Angkatan Darat,
7. Kepala Staf "U" Angkatan Darat,
8. Kepala Staf "PU" Angkatan Darat,
9. Kepala Perbendaharaan Negara Kementerian Pertahanan,
10. Kepala Dinas Administrasi Militer S.A.A.D.,
11. Kepala Dinas Personalia S.A.A.D.,
12. Kepala Dinas Sosial dan Kesedjahteraan Tentara S.A.A.D.,
13. Kepala Dinas Gadjil dan Pensiun S.A.A.D.,
14. Komandan Polisi Militer Pusat,
15. Kepala Djawatan Kesehatan Tentara Angkatan Darat,
16. Kepala Kantor Penetapan Pajak,
17. Panglima Territorium I s/d VII, dan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 29 Djuni 1951.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Sukarno*

SUKARNO,

MENTERI PERTAHANAN,



Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1951 tentang Pemberian Pangkat Effectief Letnan Kolonel Kepada Dr. Kornel Singwinata dalam jabatannya sebagai Kepala Rumah Sakit Tentara di Cimahi, 29 Juni 1951.

Sumber: Sekretariat Negara RI Seri Produk Hukum 1949-2005 No. 4900



Gapura yang menunjukkan batas Kota Cimahi, 1952.

Sumber: ANRI, Kempen RI Wilayah Jawa Barat No. JB5201/823

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

BPS Kota Cimahi. *Kota Cimahi Dalam Angka 2020*. Cimahi, 2021

Fernandes Trianno Momongan. "Keberadaan Militer Minahasa di Cimahi pada Masa Kolonial Tahun 1896-1942". Jurnal skripsi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sam Ratulangi Manado, 2021

Kota Cimahi. *Cimahi Dalam Arsip Jaman Pra Kemerdekaan 1870-1942*. Cimahi: Pemerintah Kota Cimahi, 2012

Nandang Rusnandar. "Sejarah Kota Bandung dari "Bergdessa" (Desa Udik) menjadi Bandung "Heurin Ku Tangtung" (Metropolitan)". *Patanjala* Vol. 2, No. 2, Juni 2010, hlm. 273-293

Nina Herlina Lubis. *Sejarah Kota Cimahi*. Cimahi: Pemerintah Kota Cimahi, 2015

## PENUTUP

Program citra daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan. Lembaga Kearsipan diharapkan mampu menjadi salah satu dinas atau instansi yang dapat mewujudkan “*clean government*” di pemerintahan daerah maupun pusat dengan melakukan penyelamatan arsip yang bernilai pertanggungjawaban historis dan hukum.

Arsip sebagai bukti otentik dan sumber informasi yang terpercaya dalam sejarah perjalanan bangsa sesungguhnya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk dijadikan pelajaran dalam pengambilan kebijakan pada masa kini. Kita juga dapat belajar dari sejarah masa lalu untuk kemajuan di masa kini dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks.

Citra Kota Cimahi dalam Arsip ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah setempat dengan menyebarluaskan kepada sekolah-sekolah akademisi, dewan, dan masyarakat umum. Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah. Pada akhirnya, arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebangsaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.



***Arsip Nasional Republik Indonesia***

Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560  
Telp. 62-21-7805851, Fax.62-21-7810280, 7805812  
<http://www.anri.go.id>, e-mail: [info@anri.go.id](mailto:info@anri.go.id)